

PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH

PROVINSI

NUSA TENGGARA, MALUKU & PAPUA





PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH

PROVINSI

NUSA TENGGARA, MALUKU & PAPUA





Peta Pembinaan Provinsi Nusa Tenggara, Maluku & Papua

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Naomi Ratna Sari, S.Si
2. Jerry Walo, S.Sos, MM
3. Meisya Mardhatillah, S.STP

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	3
C. TUJUAN	4
D. RUANG LINGKUP	4

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER PROVINSI

A. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	6
Aspek Satuan Inovasi Daerah	7
B. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	15
Aspek Satuan Inovasi Daerah	16
C. PROVINSI MALUKU	24
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	24
Aspek Satuan Inovasi Daerah	25
D. PROVINSI MALUKU UTARA	31
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	32
Aspek Satuan Inovasi Daerah	33
E. PROVINSI PAPUA	39
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	39
Aspek Satuan Inovasi Daerah	40
F. PROVINSI PAPUA BARAT	48
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	49
Aspek Satuan Inovasi Daerah	50

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan InisiatorInovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gambar 11 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12 Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gambar 13 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gambar 16 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gambar 17 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gambar 18 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan InisiatorInovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gambar 19 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 20 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 22 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Maluku

Gambar 24 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku

Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Maluku

Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Maluku

Gambar 27 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Maluku

Gambar 28 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Maluku

Gambar 29 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Maluku

Gambar 30 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Maluku

Gambar 31 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Maluku

Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku

Gambar 33 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Maluku utara

Gambar 35 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku utara

Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Gambar 38 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Gambar 39 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Maluku utara

Gambar 40 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Gambar 41 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Maluku utara

Gambar 42 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Maluku utara

Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku utara

Gambar 44 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Papua

Gambar 46 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua

Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Papua

Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Papua

Gambar 49 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Papua

Gambar 50 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Papua

Gambar 51 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Papua

Gambar 52 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Papua

Gambar 53 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Papua

Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Papua

Gambar 55 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Papua Barat

Gambar 57 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua Barat

Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Papua Barat

Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Papua Barat

Gambar 60 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Papua Barat

Gambar 61 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Papua Barat

Gambar 62 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Provinsi Papua Barat

Gambar 63 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Papua Barat

Gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Papua Barat

Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat

Gambar 66 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Provinsi Maluku beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Provinsi Maluku Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Provinsi Papua beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Provinsi Papua Barat beserta Skor Kematangannya



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk

inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah provinsi yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Informasi capaian kinerja inovasi di provinsi wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator

pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

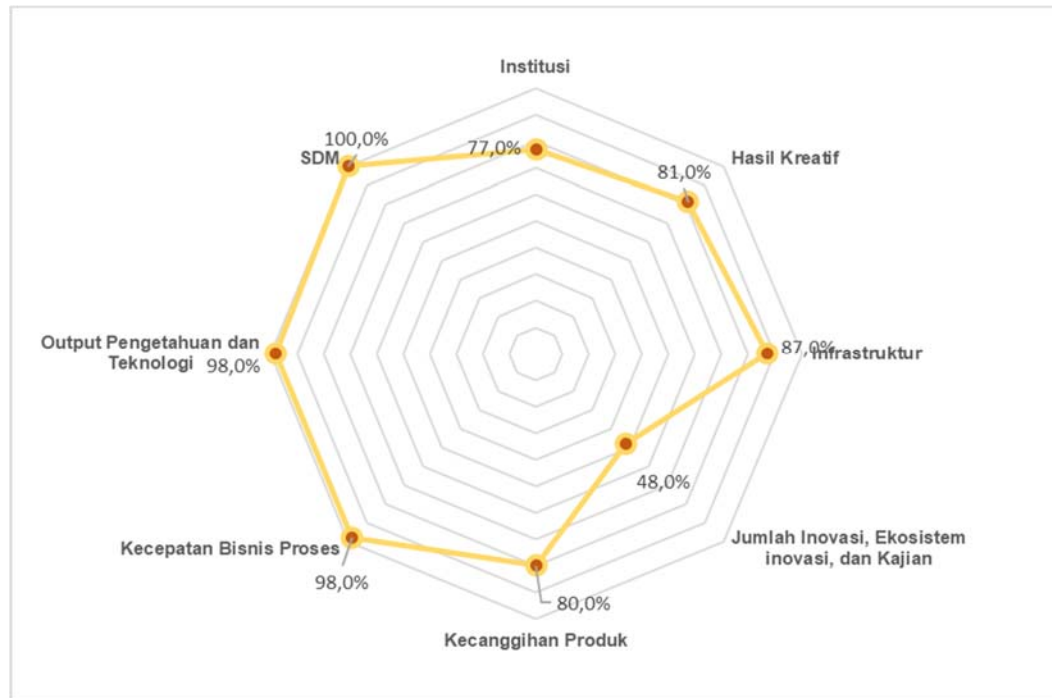
Aspek	Variabel	Indikator
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
		Roadmap SiDA
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
		Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi

The background is a solid green color with a subtle, repeating batik pattern. The pattern includes a central sun-like motif with rays, a figure carrying a large rectangular object on their back, and various floral and geometric designs. On the left and right sides, there are semi-transparent images of industrial machinery, including what appears to be a large roller or mill and a circular component with a handle.

BAB II

INOVASI DAERAH KLASTER PROVINSI

A. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 100.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 48.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

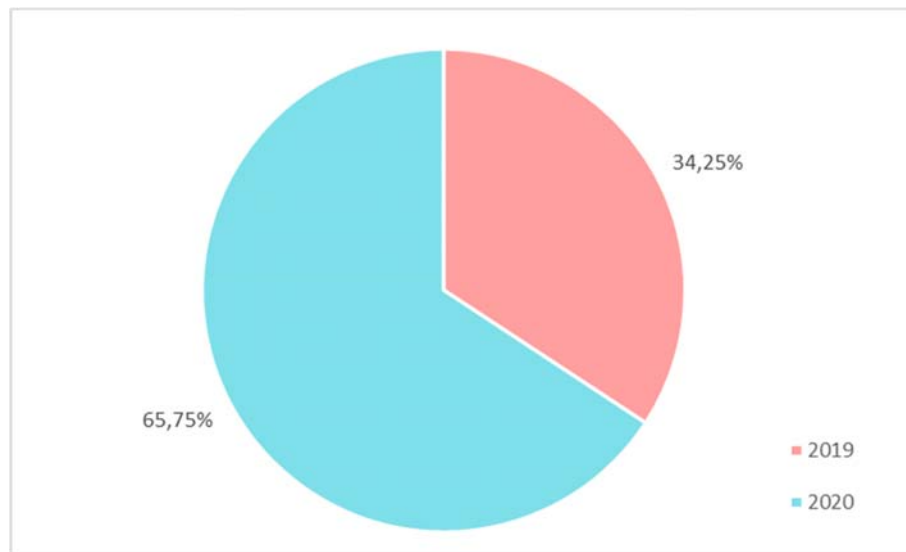
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data menunjukkan adanya perbaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,25%, dimana nilai tersebut masih cukup kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,35% yang mana angka tersebut cukup jauh dari kondisi nasional yang turun sebesar 0.02%. Kemudian dari sisi PAD mengalami penurunan sebesar 7,97% yang dibandingkan kondisi rata-rata nasional yang naik sebesar 8%. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan yang mengalami kenaikan sebesar 45,73% di mana nilai tersebut melampaui rata-rata kenaikan kualitas peningkatan perizinan pemda secara nasional sebesar 5%. Demikian pula dengan Realisasi Investasi yang naik sebesar 15,73% yang mana cukup jauh dengan rata-rata realisasi investasi seluruh

penda yang naik sebesar 0.45%. Terakhir ada indikator Pendapatan Perkapita yang naik sebesar 0.83% nilai tersebut berkebalikkan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita seluruh wilayah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.60% dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

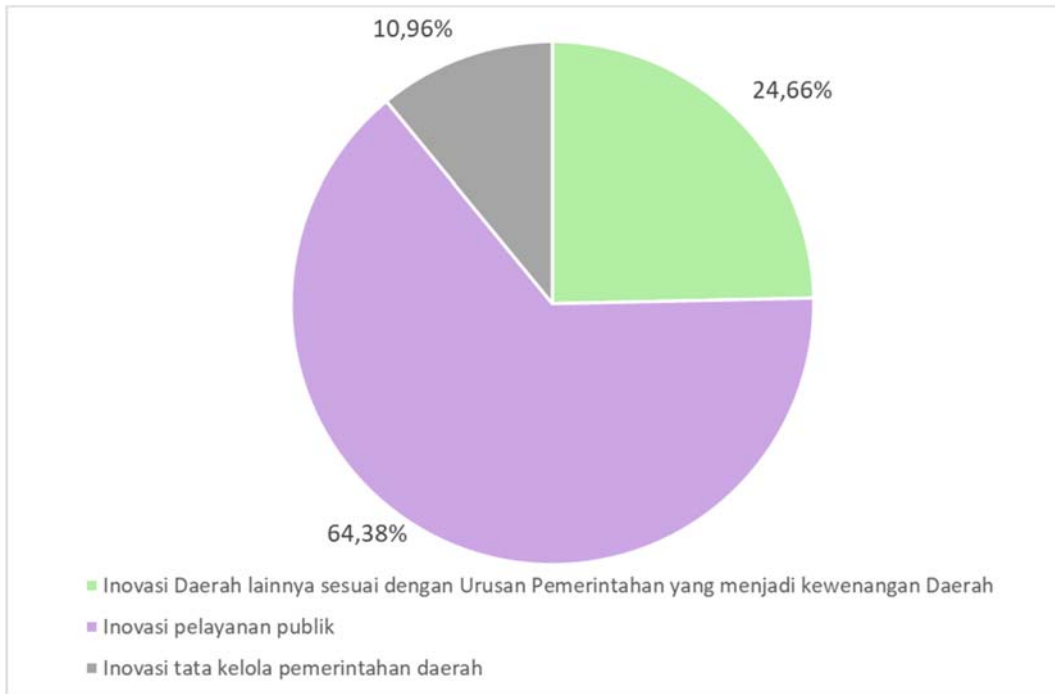
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 48 (65,75%) inovasi dari 73 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 25 (34,25%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

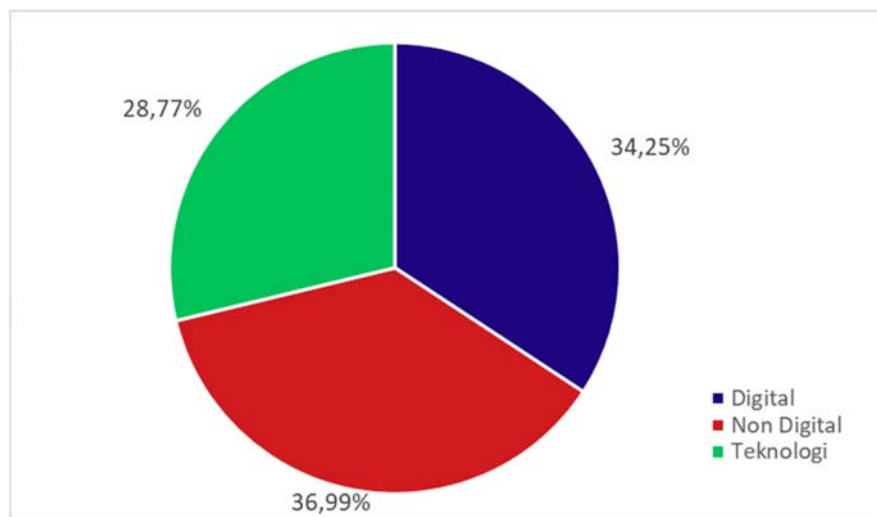
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi Pelayanan Publik mendominasi dari segi kuantitas, yaitu terdapat 47 (64,38%) inovasi. Kemudian, inovasi Urusan lainnya dengan 18 (24,66%) inovasi dan 8 (10,96%) inovasi lainnya merupakan inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

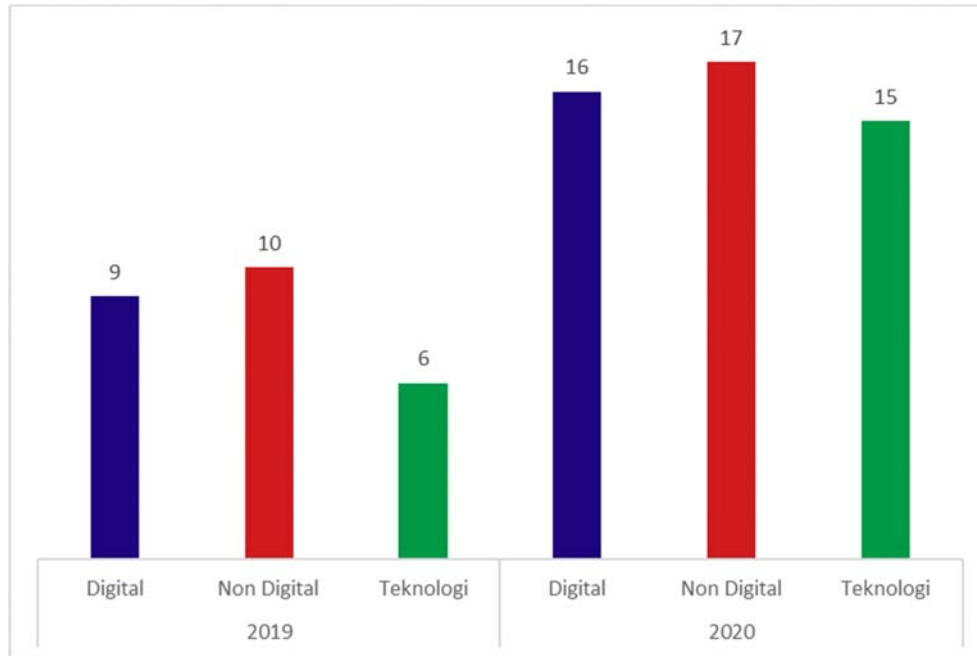
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 27 (36,99%) dari 73 inovasi daerah yang dilaporkan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan inovasi non-digital, kemudian 25 (33,33%) inovasi merupakan inovasi digital dan 21 inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

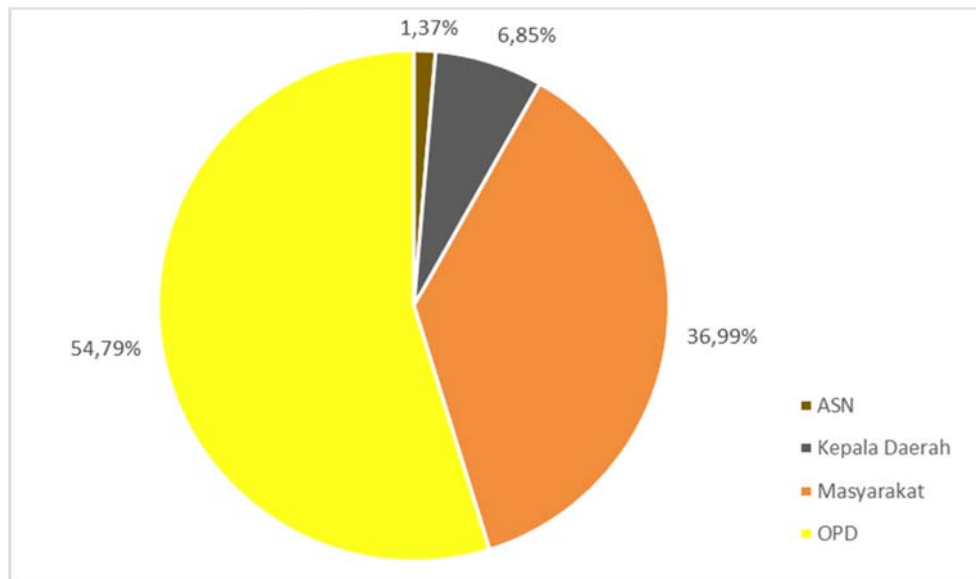
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah inovasi baru yang diterapkan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, non-digital dan juga teknologi. Pertumbuhan terbesar merupakan inovasi teknologi yang tumbuh sebanyak 9 inovasi. Untuk pertumbuhan terendah adalah inovasi digital dan non digital yang masing-masing bertambah sebanyak 7 inovasi.

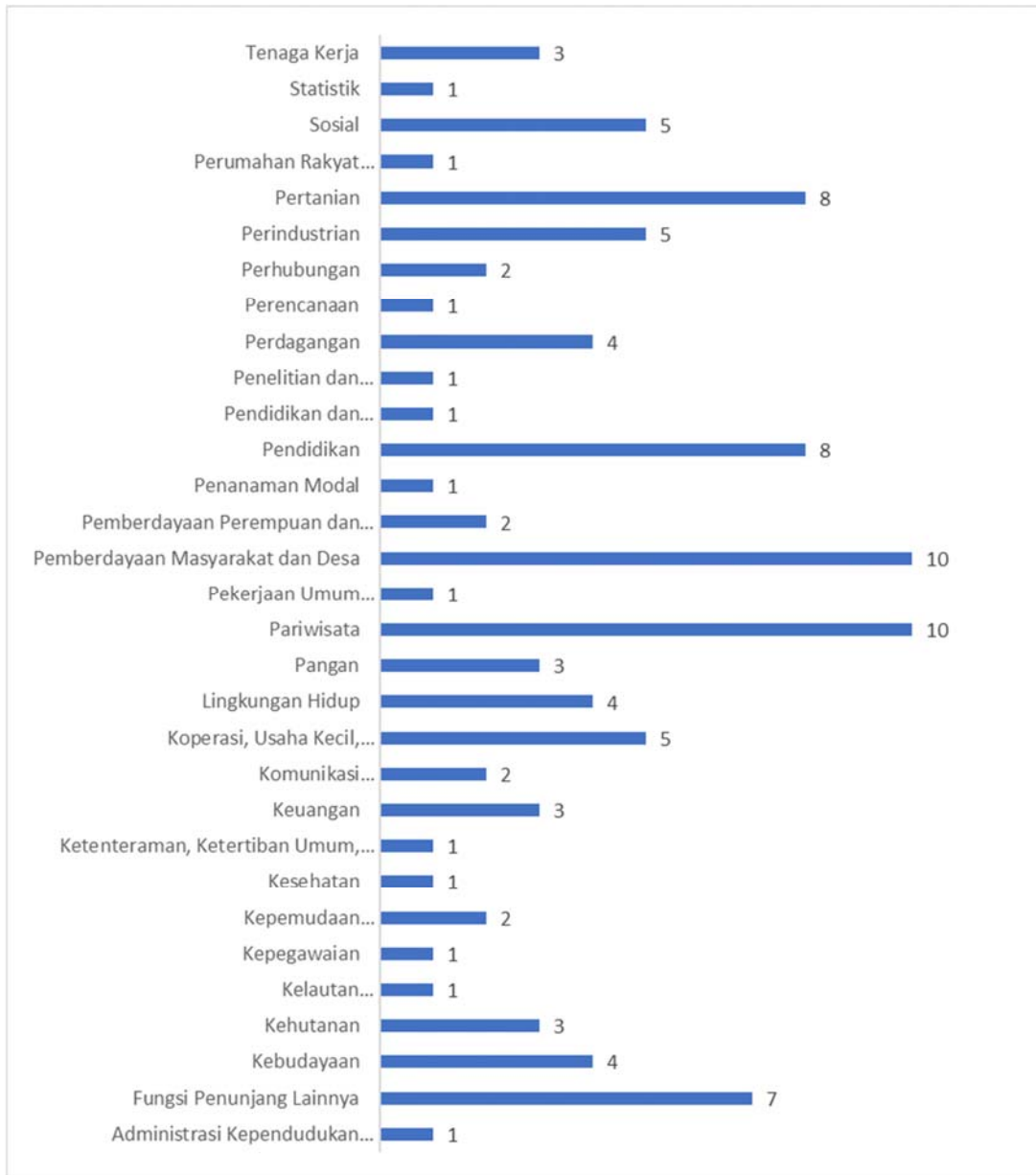
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 40 (54,79%) inovasi sementara 27 (33,33%) diinisiasi oleh Masyarakat. Kemudian 5 inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan terakhir 1 inovasi diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebaran inovasi daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata mengingat kuantitas yang dilaporkan cukup banyak dan mencakup 31 urusan termasuk fungsi penunjang lainnya. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pariwisata dengan 10 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, telah terpenuhi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.

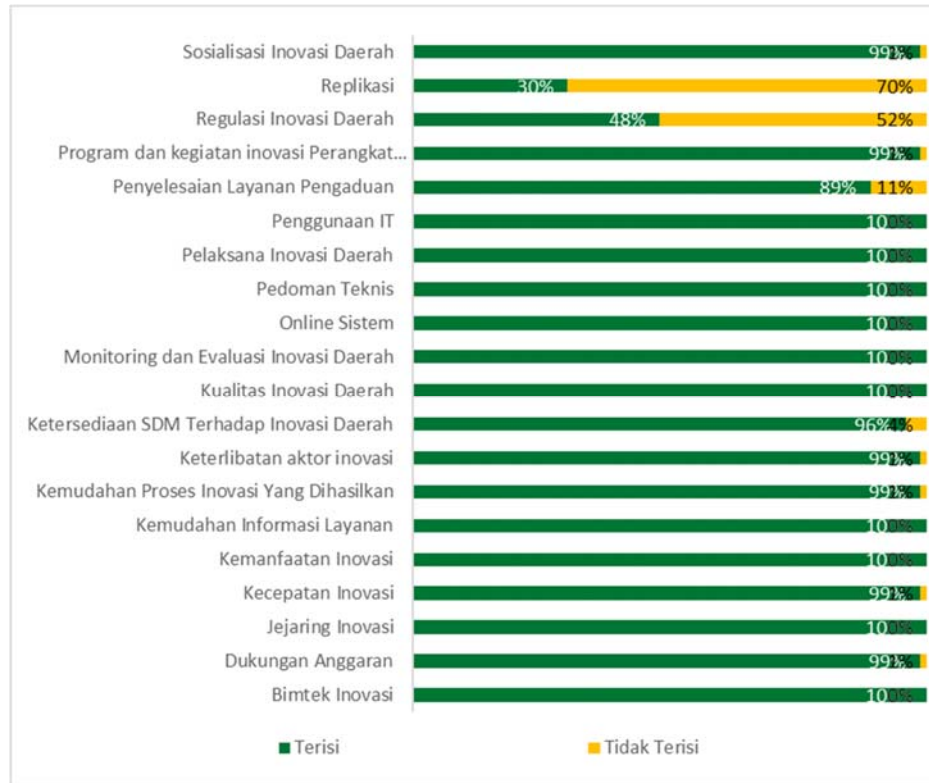
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam dua rentang yaitu sedang dengan rentang skor kematangan 50 s.d. 100 sebanyak 2 inovasi dan tinggi dengan skor kematangan lebih dari atau sama dengan 100 sebanyak 71 inovasi.

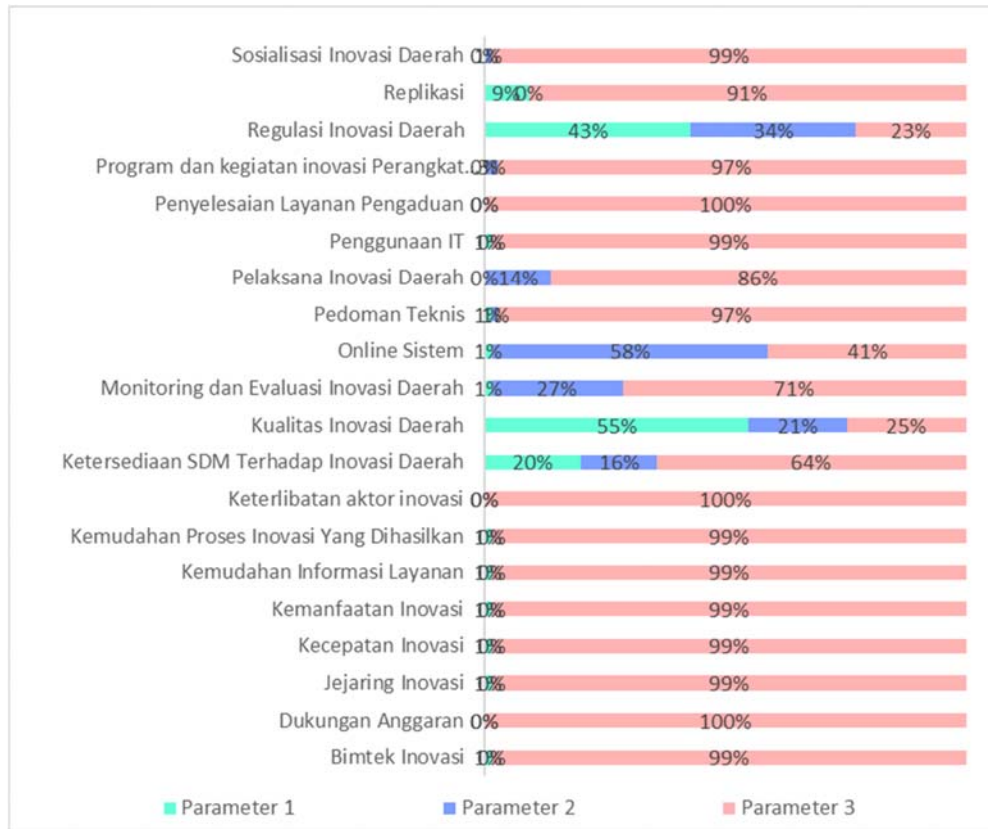
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari 112 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 7,26% sedangkan 92,74% lainnya telah terisi data pendukung. Hampir seluruh indikator telah mencapai 100% diantaranya Indikator Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi dan Bimtek Inovasi. Artinya 112 dari 112 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 30% artinya 30% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Keterlibatan Aktor Inovasi Daerah, dan Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya 100% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem sebesar 58% artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Online Sistem termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi sebesar 55% artinya separuh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Skor Kematangannya

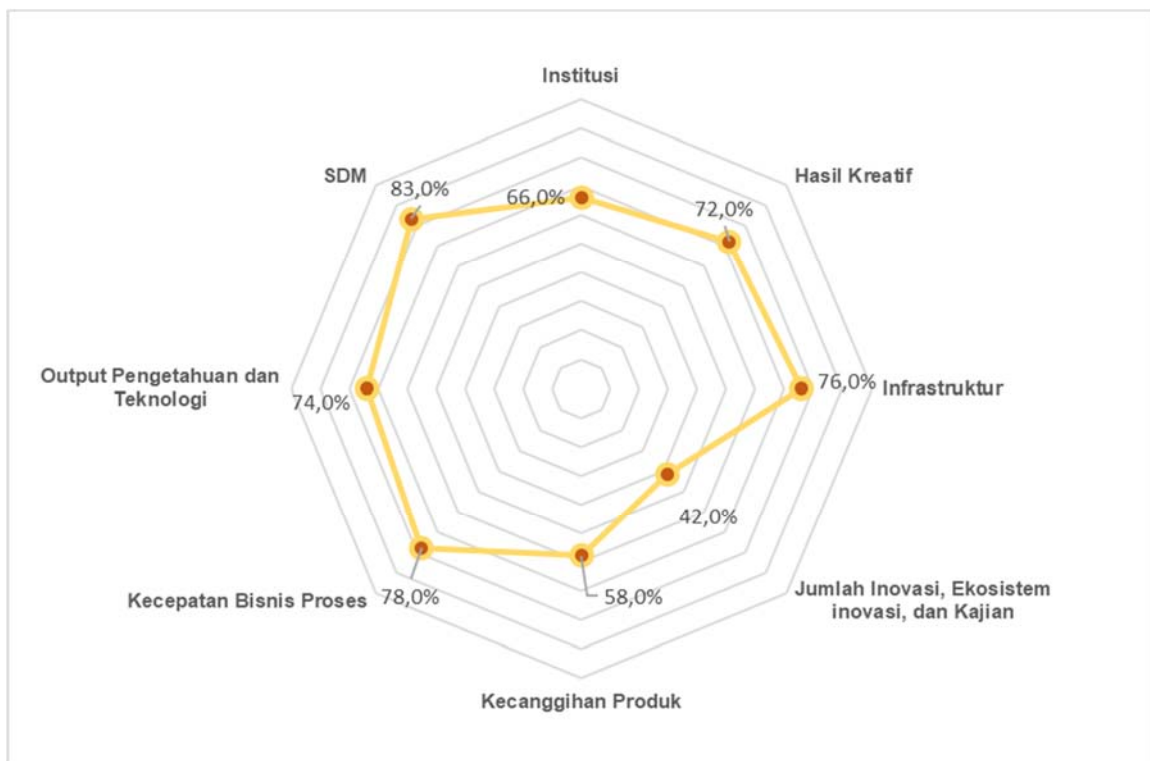
Tabel 2. Daftar Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SIMANIS (Sistem Informasi Manajemen Industri)	126
Mobil Edukasi Bencana	136
Pelor Mas (Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat)	133
Media Center Dinas Sosial Prov. NTB	136
NTB Belajar Dari Rumah	122
Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Publik Melalui NTB Care	141
NTB Satu Data	130
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan	134
SISTEM INFORMASI PELAYANAN ANGKUTAN UMUM NUSA TENGGARA BARAT	118
Sistem Informasi Pendidikan dan Jejaring di Zona Merah Bencana (SIDIK JARI ZONA MERAH)	122
Sistem Informasi Barang dan Aset (SIMBA)	118
SPAB – NTB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	134
Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	138
E-PIDALIT (Elektronik Pengurusan Ijin Data dan Penelitian) di RSUD Provinsi NTB	73
NTBMall.com	141
Kelompok Kampung Iklim " Batu Ngompal"	100
e-SAKIP Pemerintah Provinsi NTB	129
NTB Satu Peta	132
Lestari NTB	126
Desa Bersinar	128
SIDATU (Sistem Informasi Data Tamu)	117
Satuan Tugas Pelayanan Pengawasan Pengendalian Sosial (Satgas P3S)	125
Samsat Delivery	122
MAHADESA TDC	134
Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang	124
Pengendali OPT Ramah Lingkungan	125
Upaya Penyelamatan Plasma Nutfah Lokal Daerah Nusa Tenggara Barat Melalui Kegiatan Observasi dan Pendaftaran Varietas Lokal	130
Sistem Informasi Desa (Open SID) - Desa Rarang Selatan, Terara, Lotim	139
Sitem Informasi Manajemen Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (SIMPEL PBJ)	130

Nama Inovasi	Skor Kematangan
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) BERBASIS KOMODITAS CABE TERINTEGRASI UNGGAS (TanCabGas) MELALUI HATINYA PKK	132
Sistem Informasi Pengendalian Pengawasan (SIMDALWAS)	111
e-wisma NTB	117
i-deposit NTB	120
Pengembangan Program Sekolah Mandiri Tanaman Sayur dan Buah Edukasi (SMARTS-BE)	134
BUNGATRI (Lumbung Pangan Terintegrasi) Alternatif Penurunan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat	119
Pengembangan Kendaraan Listrik (PENGENDALI)	130
PePADu Plus (Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus)	136
Sistem Informasi Kelompok Peternakan (SIMPONAK)	121
E-JOURNAL BESTARI BPSDMD PROVINSI NTB	126
desa wisata kampung anggur	113
PIROLISIS (MESIN PENGOLAH SAMPAH PLASTIK MENJADI BBM)	132
KONSAKA FEED (Pakan Komplit Untuk Ternak Ruminansia)	116
SISTEM INFORMAS REHAB REKON (SIRKON)	130
Pusat Rekreasi Masyarakat (PUREKMAS)	120
Desa Wisata Kampung Adat Suku Sasak Sade	120
Desa Wisata Hijau Bilebante	134
DESA WISATA BONJERUK BERBASIS WISATA ALAM DAN BUDAYA	136
DESA WISATA KEMBANG KUNING	141
PAREKRAF DESA LOYOK (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desa Loyok)	126
Manajemen PRCC NTB {TataKelola Pemerintahan NTB}	128
SiMadu (Sistem Managemen ASN Terpadu)	126
SMaRT-KPH (Sistem Manajemen Informasi Terpadu KPH) Rinjani Barat	133
Spot Olahraga Desa Wisata Mantar	96
Kuliner, Bahari berbasis Budaya Pulau Bungin	128
DESA WISATA MALAJU	128
Desa Wisata Adat Budaya Maria	131
Desa Wisata Kampung Tenun Ntobo	120
DESA WISATA KAMPUNG BAWANG BIMA	133
Desa Wisata Bahari Tolouwi	124
Prafasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota Se Provinsi NTB	127
PROGRAM MAWAR EMAS	122
Aplikasi SIMAMI (Sistem Informasi Manajemen Adminsitrasi Izin)	118

Nama Inovasi	Skor Kematangan
G-discovery, Game Online untuk Pemahaman Konsep Matematika Tingkat SD (Sekolah Dasar)	118
Aplikasi Klinomics UMKM	123
Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Beasiswa (SIMILEA)	116
Aplikasi MANIS (Manajemen Informasi Sekolah)	118
Aplikasi Ruang Temu	118
Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Masjid (SIKANGMAS)	116
Lapak Aset (LAS) NTB	118
SINADA (Sistem Informasi Penataan Desa)	140
VACANCY-ID	122
APLIKASI ENSIKLOPEDIA KEBUDAYAAN SUMBAWA	122
Pengemasan Steril Produk Olahan Pangan Khas NTB	129

B. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Gambar 12 Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan diagram variable ukur indeks inovasi daerah di atas, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya

Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 42.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



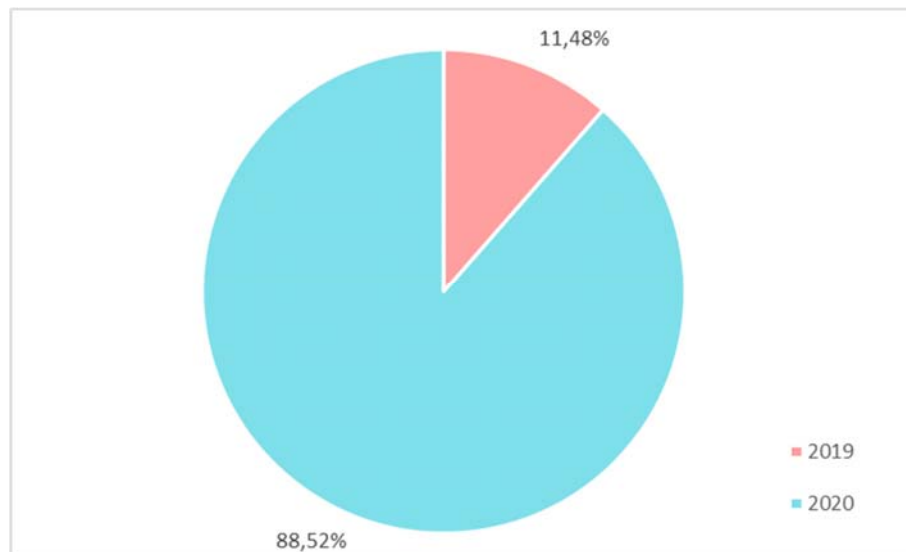
Gambar 13 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.93%, di mana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.12%, angka tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 1.56%, angka ini lebih

rendah dari nilai tengah parameter 2 indikator tersebut, yaitu turun sebesar 1.85%. Indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan sebesar 0.04% dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 15.66%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Indikator Jumlah Pendapatan PAD naik sebesar 27.99% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan sebesar 1.85%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang turun sebesar 19.49% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

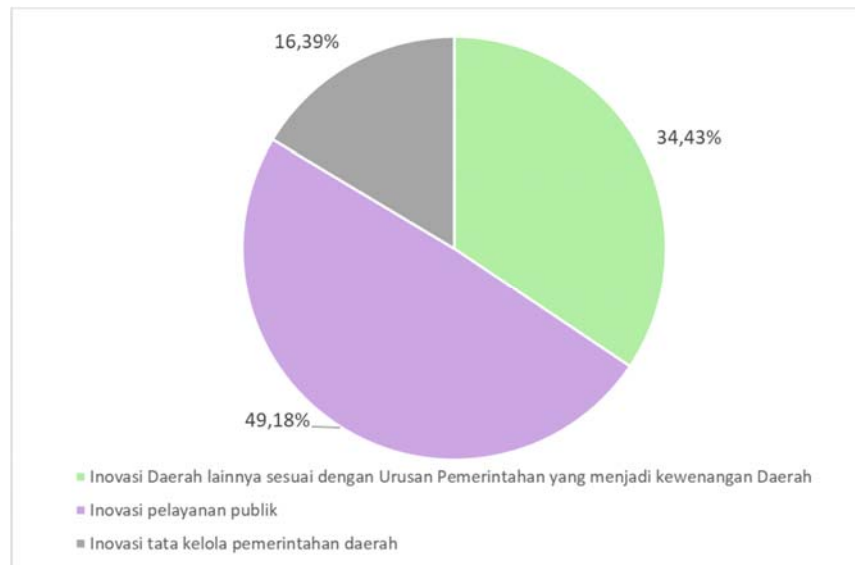
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 54 (88.52%) inovasi dari 61 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 7 (11.48%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

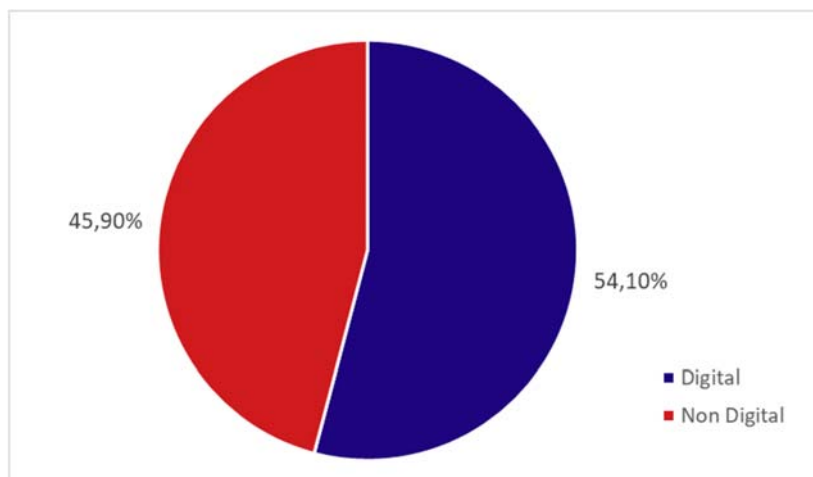
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 30 (49,18%) inovasi dan 12 (34,43%) inovasi bentuk lainnya serta 10 (16,39) inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

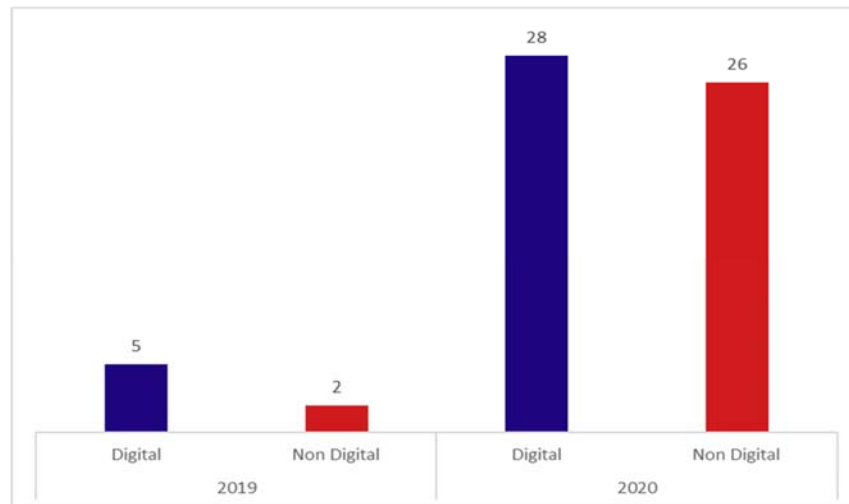


Gambar 16 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 33 (54,10%) dari 61 inovasi daerah yang dilaporkan Provinsi Nusa

Tenggara Timur merupakan inovasi digital dan 28 (45,90%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

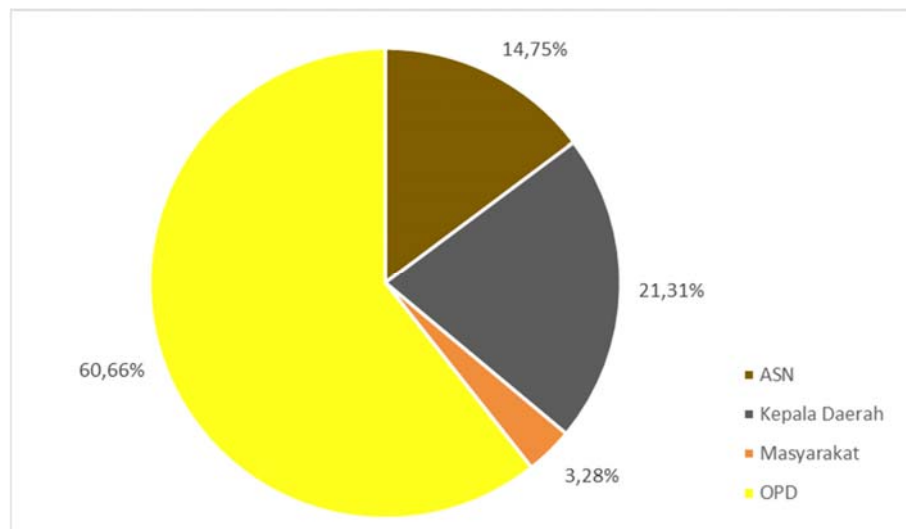
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa 28 inovasi non digital baru mulai diterapkan pada tahun 2020 di mana pada tahun 2019 ada 2 inovasi non digital baru mulai diterapkan. Begitu pula dengan 28 inovasi digital yang baru mulai diterapkan di tahun 2020 sementara di tahun 2019 ada 5 inovasi baru yang mulai diterapkan.

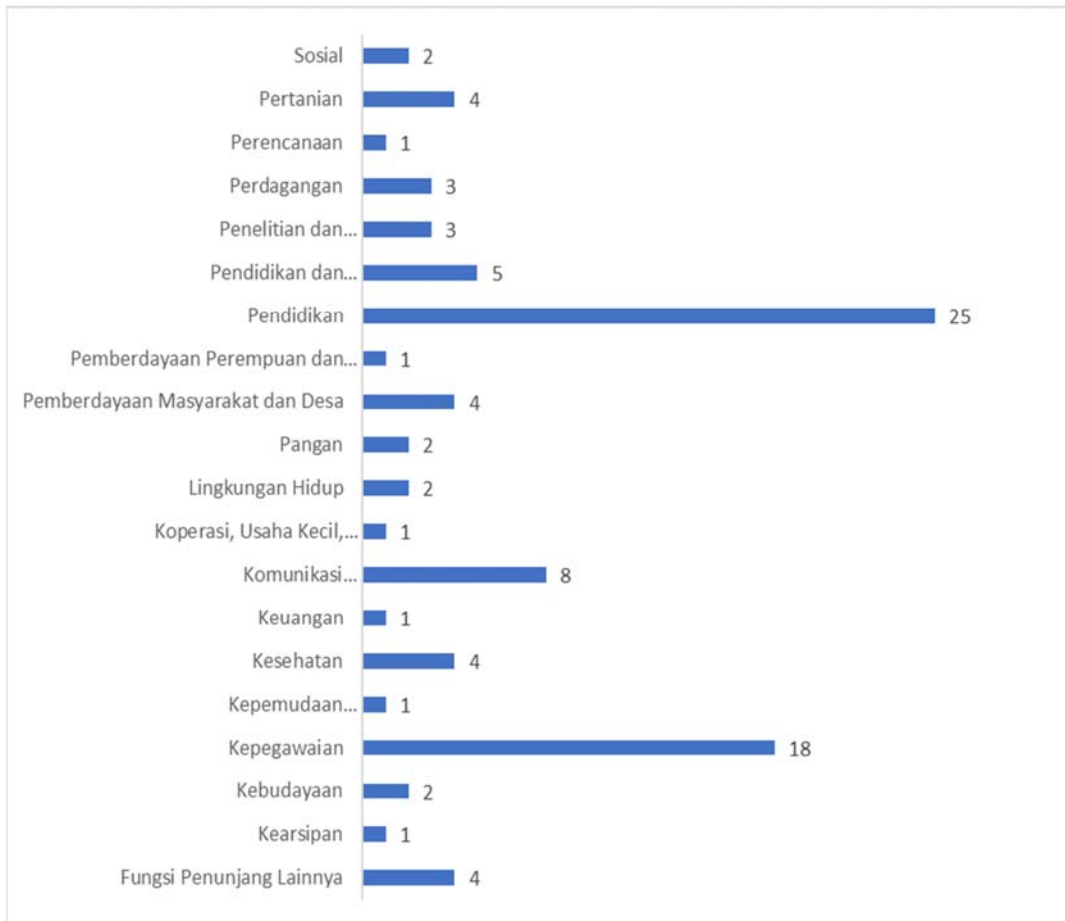
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 37 (60,66%) inovasi kemudian 13 (21,31%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Selanjutnya, 9 (14,75) inovasi diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara dan terakhir 2 (3,28%) diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

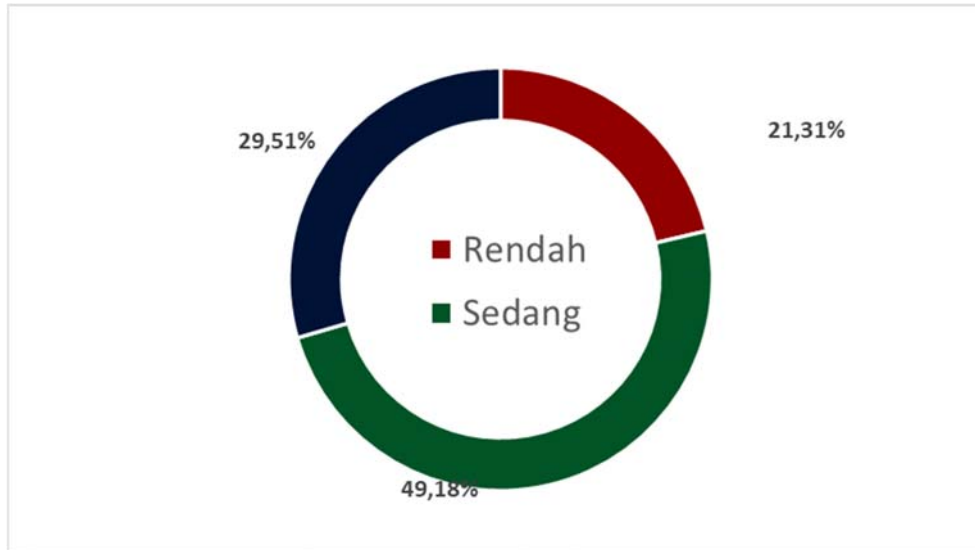


Gambar 19 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sebaran inovasi daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata dengan mencakup 20 urusan termasuk Fungsi Penunjang Lainnya. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Pendidikan dengan 25 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 2

inovasi, pendidikan dengan 25 inovasi dan kesehatan dengan 4 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

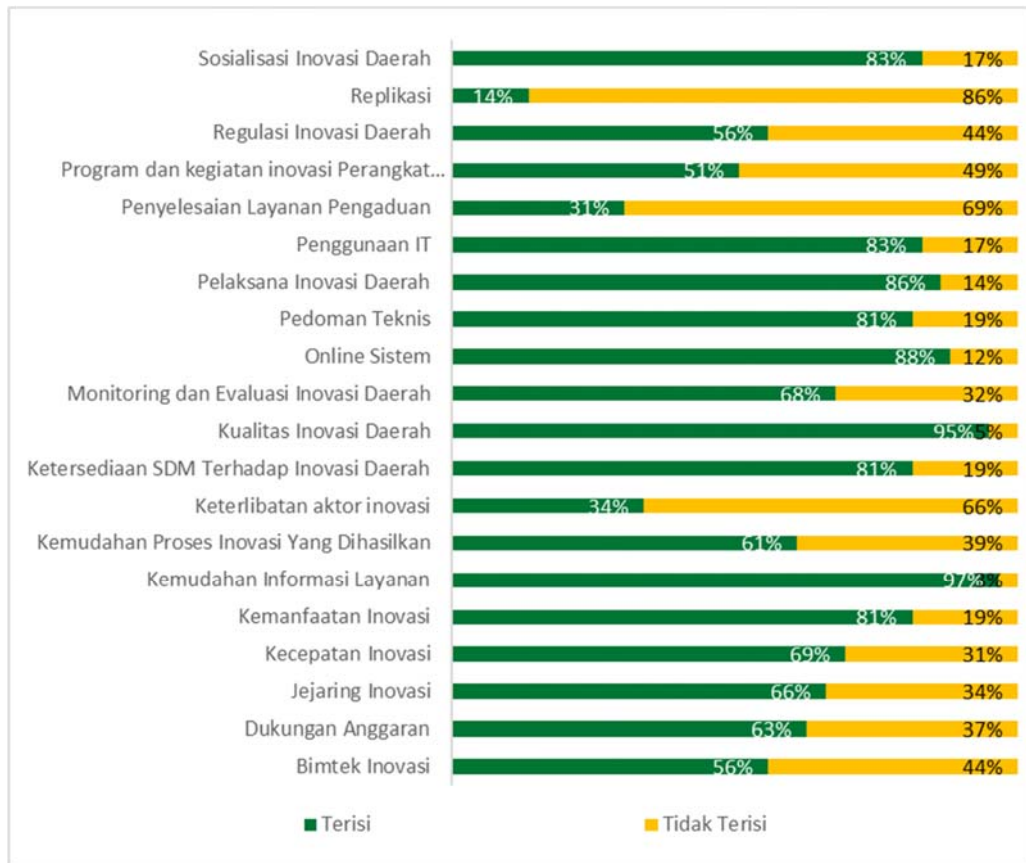
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, dimana terdapat 30 (49,18%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, kemudian 18 (29,51%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi dan 13 (21,31%) termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di atas 100, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan rendah adalah inovasi dengan skor kematangan di bawah 50.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

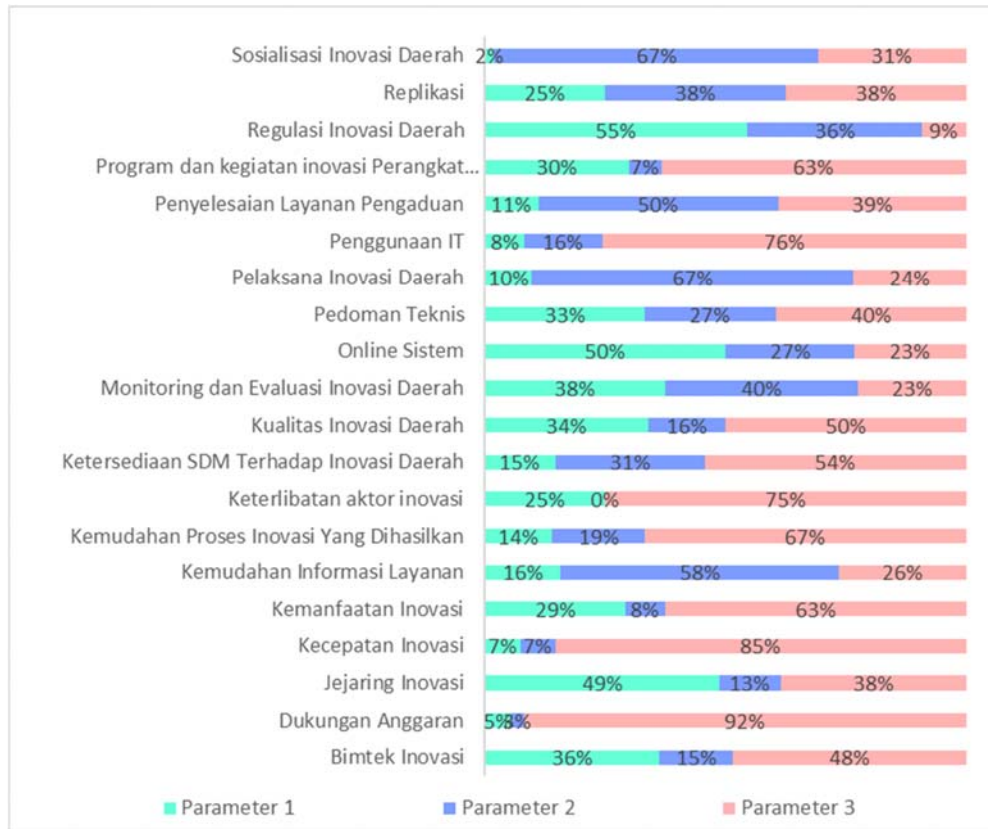


Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari 61 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 32,80% sedangkan 67,20% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi, yaitu Kemudahan Informasi Layanan, 97%. Artinya, 97% inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 14% artinya 14% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran dengan keterisian 92%, artinya 92% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 67% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 55% artinya 55% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Skor Kematangannya

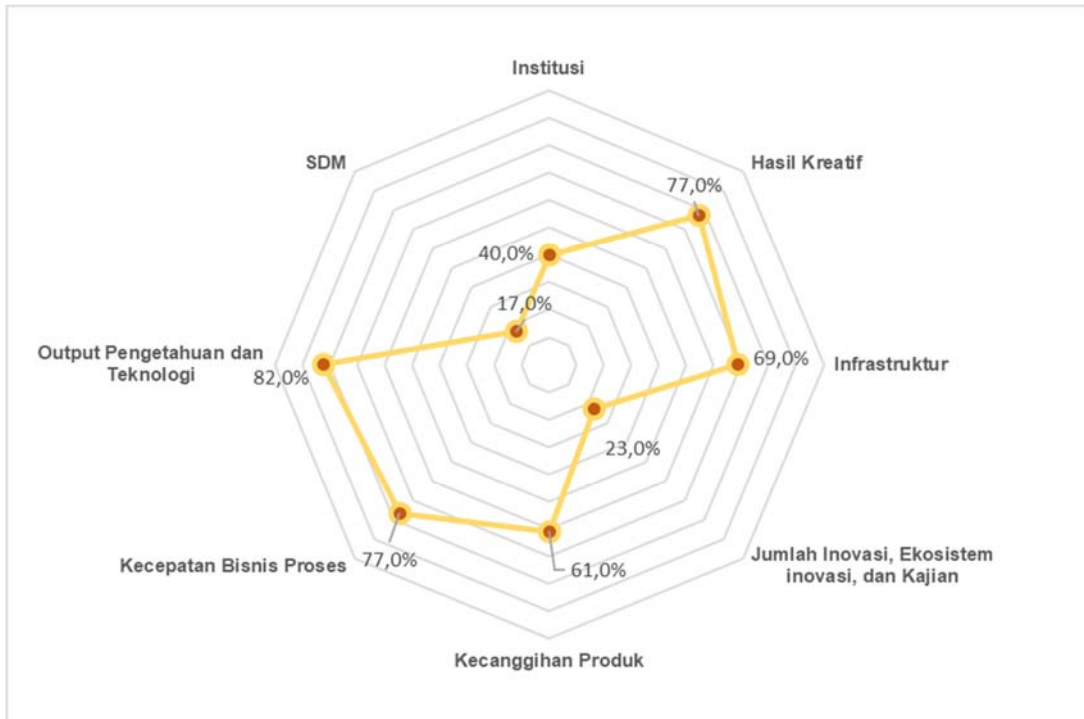
Tabel 3. Daftar Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Sistem Informasi Hasil Kelitbangan Pembangunan Untuk Masyarakat NTT (Si Abang Bagaya)	120
FLOBAMORA e-Journal	123
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik (SiMAE) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	72
Aplikasi Sistem Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Si Ikan Mas) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	67
Pelayanan Publik melalui Media Sosial	73
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Anak SD (Sekolah Dasar) di 22 Desa/Kelurahan Model PKK	56
E-INFORMASI	42
Slip Gaji Elektronik	61
Pengintegrasian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ke dalam Sistem Manajemen Kepegawaian Daerah	86
E-Data Pensiun	90
E-SURAT CUTI	82
E-Surat Masuk Keluar	69
IKM EKSTERNAL BERBASIS ELEKTRONIK	78
Mini Galeri "Su Tau Ko ?"	51
Lapor Cepat PNS Meninggal Dunia	63
E-Audit	48
Penyediaan Miniatur dan Narasi Rumah Adat Kabupaten Alor pada Galeri Dekranasda Provinsi NTT	46
Eco Office	135
Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	48
Penerapan Kantor Ramah Lingkungan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	90
Kenaikan Pangkat Berbasis Less Paper	55
Pengadaan TV LED dengan muatan video Kabupaten Sumba Timur pada Stand Kabupaten Sumba Timur di lantai 2 Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur	45
Literasi Alam "Mangrove" SMAN 1 Rindi Umalulu	41
Prakarya Tenun Pahikung SMAN 1 Rindi Umalulu	94
Pembuatan Website Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur	95

Nama Inovasi	Skor Kematangan
BDR SMAN 1 Rindi Umalulu lewat Radio "LOVE SUMBA FM" di 107,7 MHz	72
Pengolahan Handsanitizer Herbal SMAN 1 Rindi Umalulu	109
Pengolahan Pangan Kelor SMAN 1 Rindi Umalulu	120
Pembuatan Sirup Rumput Laut Sebagai Minuman Era Covid-19 SMK Negeri 1 Mambo	135
Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Publikasi Kegiatan Dan Penyebaran Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	101
Implementasi Penilaian Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Bagi Pejabat Fungsional Tertentu Dan Pejabat Pelaksana Berbasis CAT (Computer Assisted Test) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	126
Aplikasi Sinkronisasi Data Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	78
Si PRISKA (Sistem Pengajuan Karis dan Karsu)	46
Pengisian Laporan Tugas Belajar Secara Online Bagi PNS Provinsi NTT	125
Whistle Blowing System (WBS)	56
SiGaBer (Sistim Informasi Gaji Bekala)	123
PENGEMBANGAN TENUN IKAT KAIN ADAT AMARASI OLEH SMA NEGERI 1 AMARASI SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	41
PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UNTUK BUDIDAYA SORGUM	125
Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Online (PPK Online) Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
Pakaian Adat Kabupaten Ende (Pria dan Wanita) pada Galeri Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur	59
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIK) Bidang GTK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. NTT	74
Pengolahan Limbah Anorganik Potensi Lokal SMAN 1 Rindi Umalulu	110
Pembelajaran Jarak Jauh dengan Metode Titik Kumpul SMA Negeri 8 Kupang	58
KUNJUNGAN RUMAH (HOME VISIT) SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 SMA NEGERI 1 MAUMERE	102
Aplikasi IPOS Pada Toko Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur	46
penggunaan Barcode pada setiap produk di Toko Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur	56
Penggantian Sofa lama di Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Sofa dari bahan daur ulang	67

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pengadaan, Penggunaan dan Kerjasama Pemasaran Meja Kayu Jati Kreasi Siswa SMK N 2 Kupang pada galeri Dekranasda Provinsi NTT	134
BUKU SUARA GURU PERBATASAN SMAN 1 AMFOANG TIMUR	113
MINUMAN SEHAT SWEET KIU DRINK SMAN 1 AMFOANG TIMUR	101
Gerakan Belajar Kerja Nyata (BKN) SMAS Reformasi Plus : Penerapan Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation System) dalam menanam Sayuran Hijau Organik	36
Gerakan Belajar Kerja Nyata (BKN) SMAS Reformasi Plus : Pembuatan Pupuk Bokashi	126
Integrasi Metode Pembelajaran Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering and Math) dalam pembelajaran Sains dan Matematika di SMAS Reformasi Plus	67
Innovation Class (IC) : Kelas Eksperimen - Penerapan Materi Termokimia Pembuatan ICE PACK (Pengganti Es Batu) SMAS Reformasi Plus	47
Innovation Class (IC) : Kelas Produk Kreatif - Pohon Literasi SMAS Reformasi Plus	140
Kelas Inspirasi SMAS Reformasi Plus	52
Gerakan Belajar Kerja Nyata (BKN) SMAS Reformasi Plus : Budidaya Sorgum varian Bioguma 3	64
Innovation Class (IC) : Kelas Eksperimen - Penerapan Materi Termokimia Pembuatan ICE PACK (Pengganti Es Batu) SMAS Reformasi Plus	63
PRODUK SABUN WAJAH DARI DAUN KELORI (MORINGA OLEIFERA) SMA SWATA REFORMASI PLUS	70
E-code (aplikasi penomoran surat berbasis web)	44
Aplikasi e-Lacak	44

C. PROVINSI MALUKU



Gambar 23 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Maluku

Berdasarkan diagram variabelukur indeks inovasi daerah di atas, Provinsi Maluku memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 82.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Sumber Daya Masyarakat masih cukup rendah, yaitu 17.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

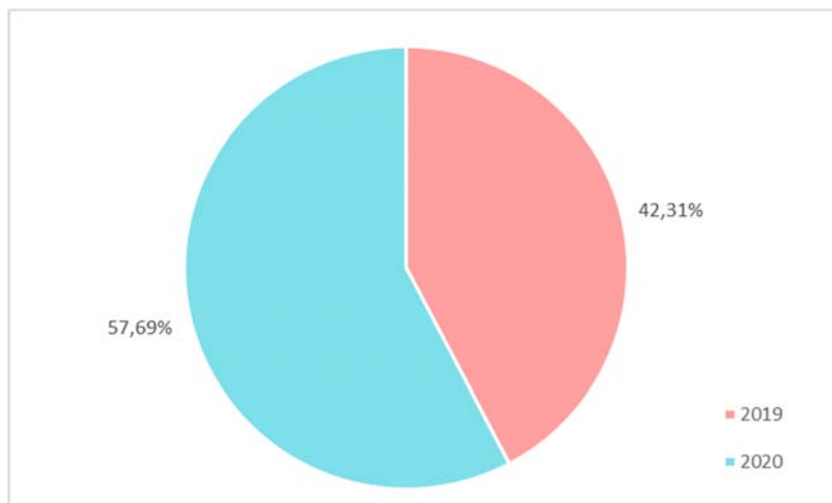


Gambar 24 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Maluku tidak melakukan pelaporan satuan pemerintah daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

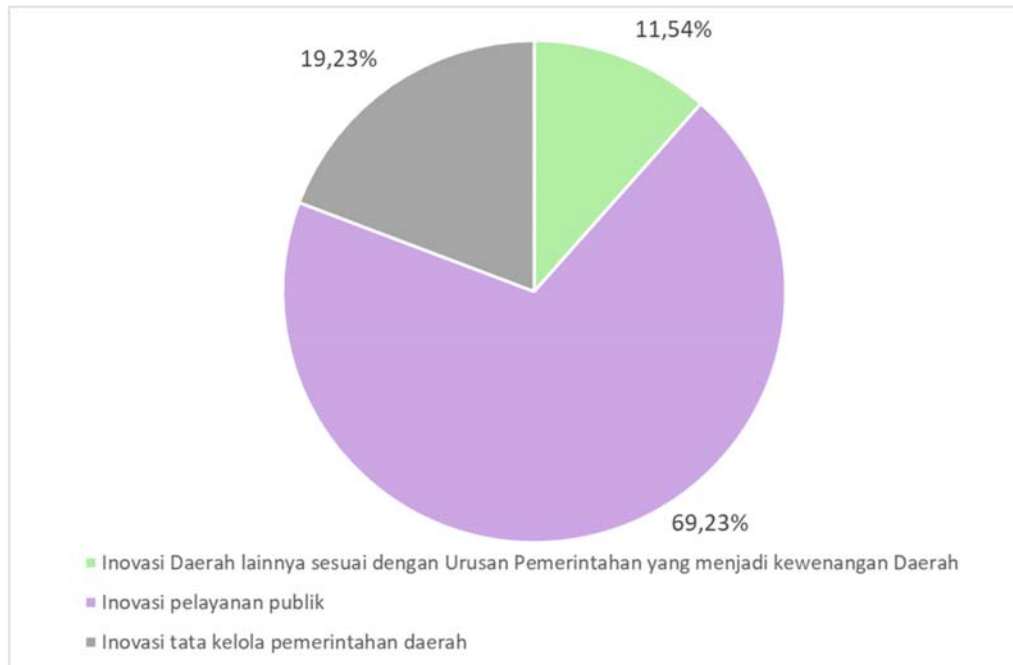
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Maluku

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 15 (57,69%) inovasi dari 26 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 11 (42,31%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

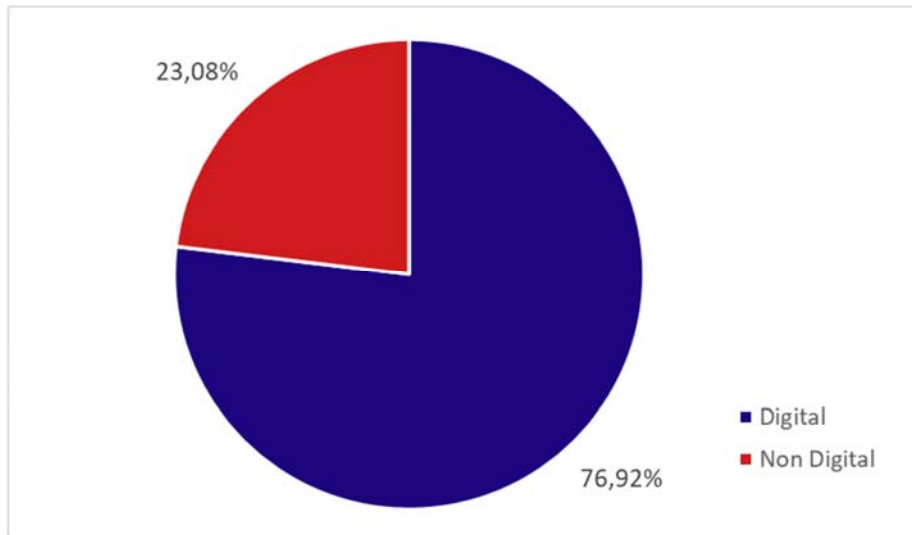
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Maluku

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku, yaitu inovasi pelayanan public, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan Inovasi Bentuk Lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 18 (69,23%) inovasi dan 5 (19,23%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan serta 3 (11,54%) inovasi merupakan inovasi bentuk lainnya.

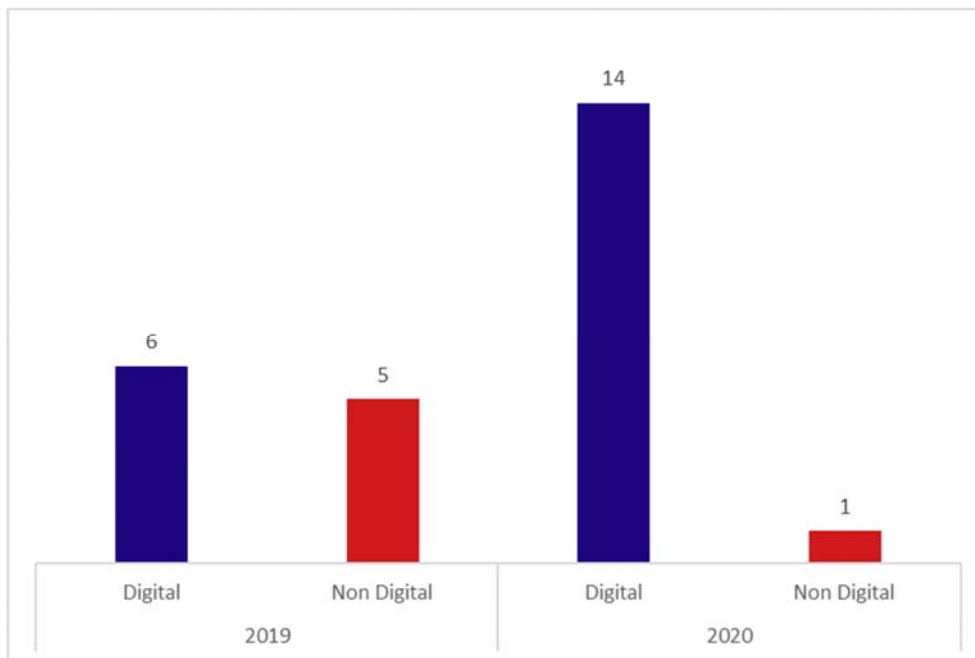
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Maluku

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 20 (76,92%) dari 26 inovasi daerah yang dilaporkan Provinsi Maluku merupakan inovasi digital dan 6 (23,08%) inovasi lainnya merupakan inovasi non-digital.

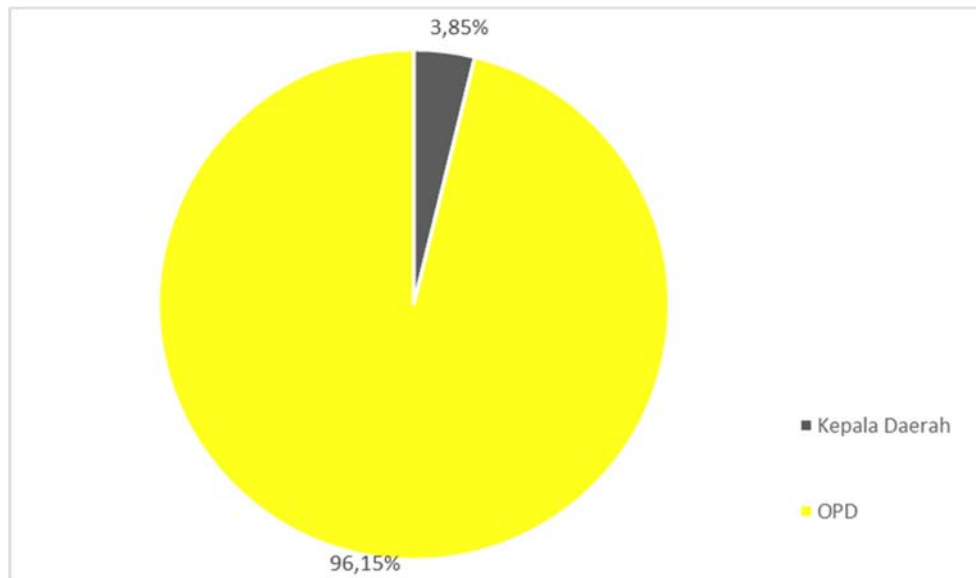
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Maluku

Terdapat kenaikan jumlah sebesar 8 inovasi digital yang baru diterapkan di tahun 2020 dari tahun 2019. Sayangnya tidak diikuti oleh kenaikan jumlah inovasi non digital. Pada tahun 2020 inovasi digital yang mulai diterapkan di Provinsi Maluku ada 1 yang mana jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2019 dengan 5 inovasi digital mulai diterapkan.

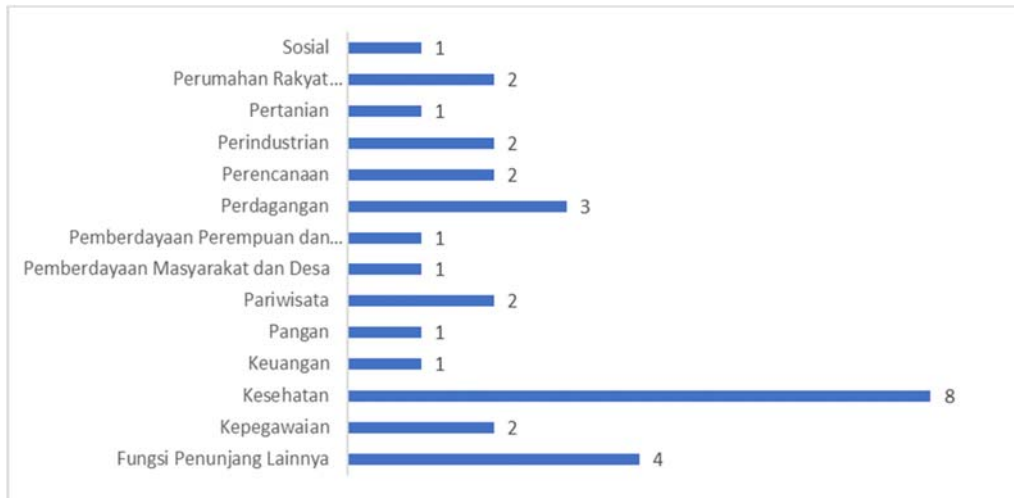
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Maluku

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 25 (96,15%) inovasi sementara 1 (3,85%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD, Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara belum dilaporkan di tahun 2021.

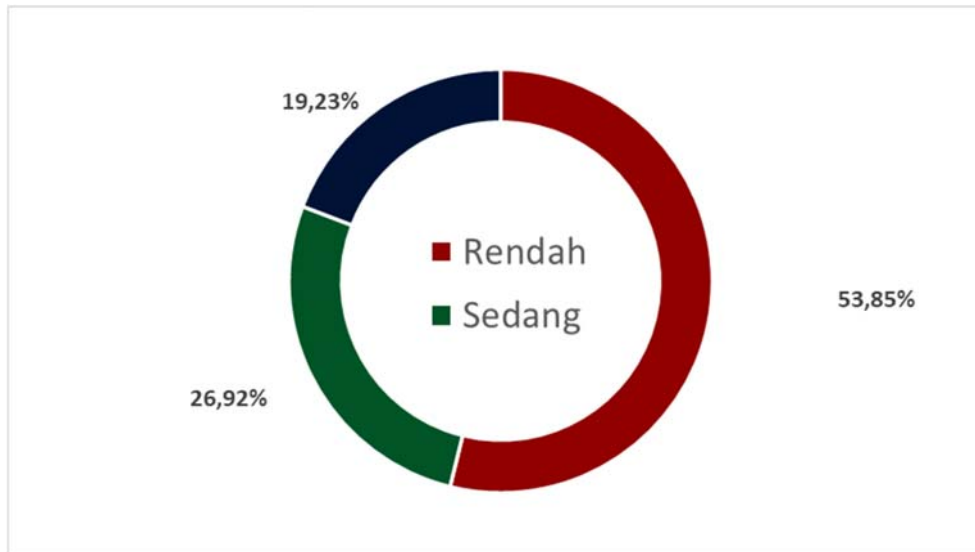
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Maluku

Sebaran inovasi daerah pada Provinsi Maluku berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 8 inovasi kemudian 4 inovasi dari Fungsi Penunjang Lainnya, Selanjutnya 3 inovasi dari urusan Perdagangan. Kemudian, masing-masing 2 inovasi dari urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perindustrian, Perencanaan, Pariwisata, dan Kepegawaian. Terakhir dengan masing-masing 1 inovasi dari urusan Sosial, Pertanian, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pangan dan Keuangan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 8 inovasi, Sosial dengan 1 inovasi dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 2 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

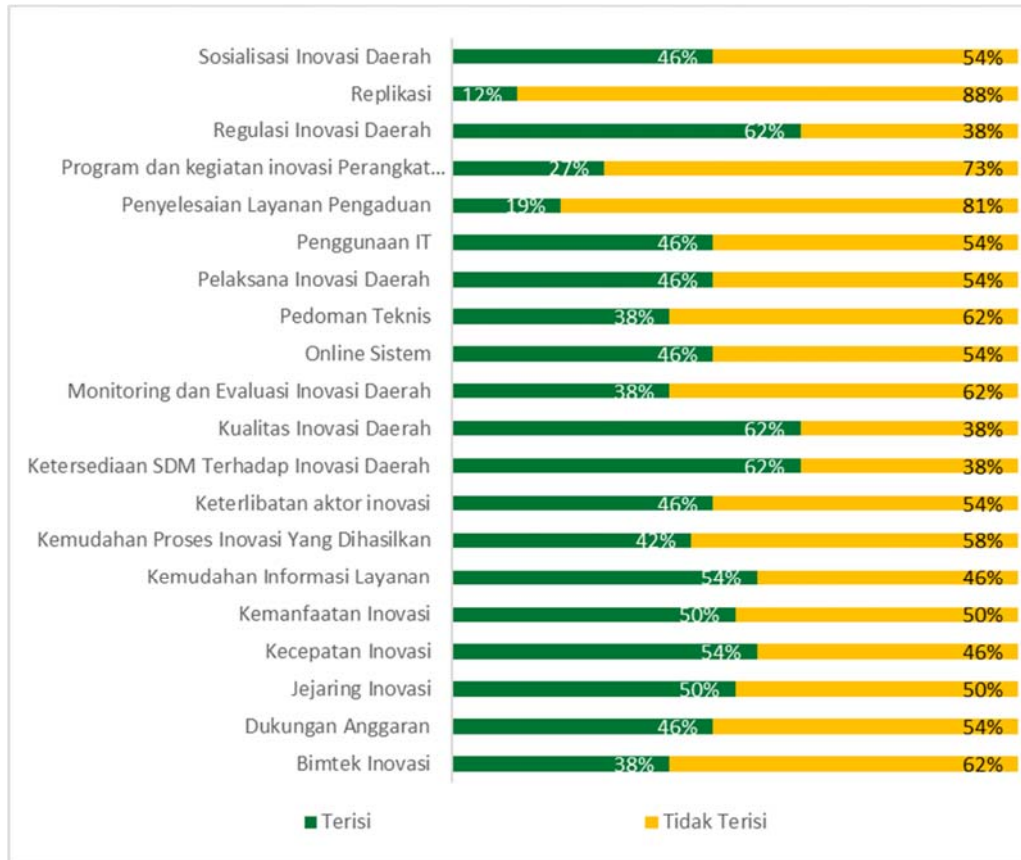
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Maluku

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan rendah, dimana terdapat 14 (53,85%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Kemudian terdapat 7 (26,92%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan 5 (19,23%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

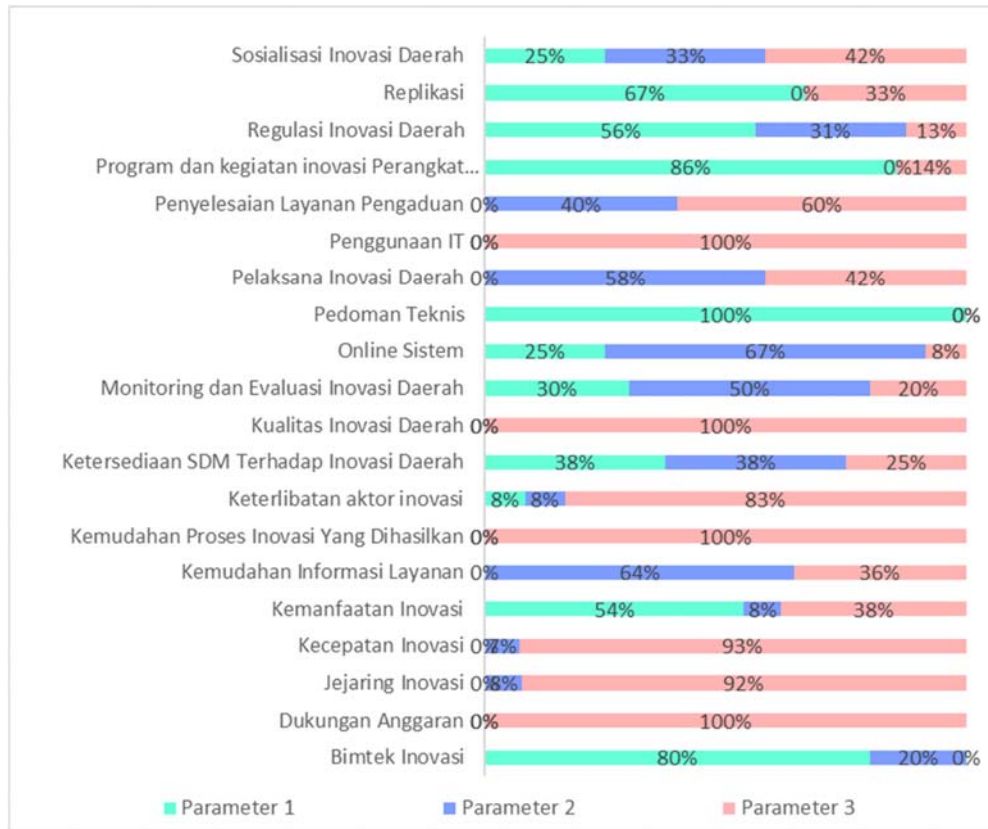


Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku

Dari 26 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 55,77% sedangkan 44,23% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 62%, yaitu: Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi dan Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan. Artinya, lebih dari separuh inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 12% artinya sedikit inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

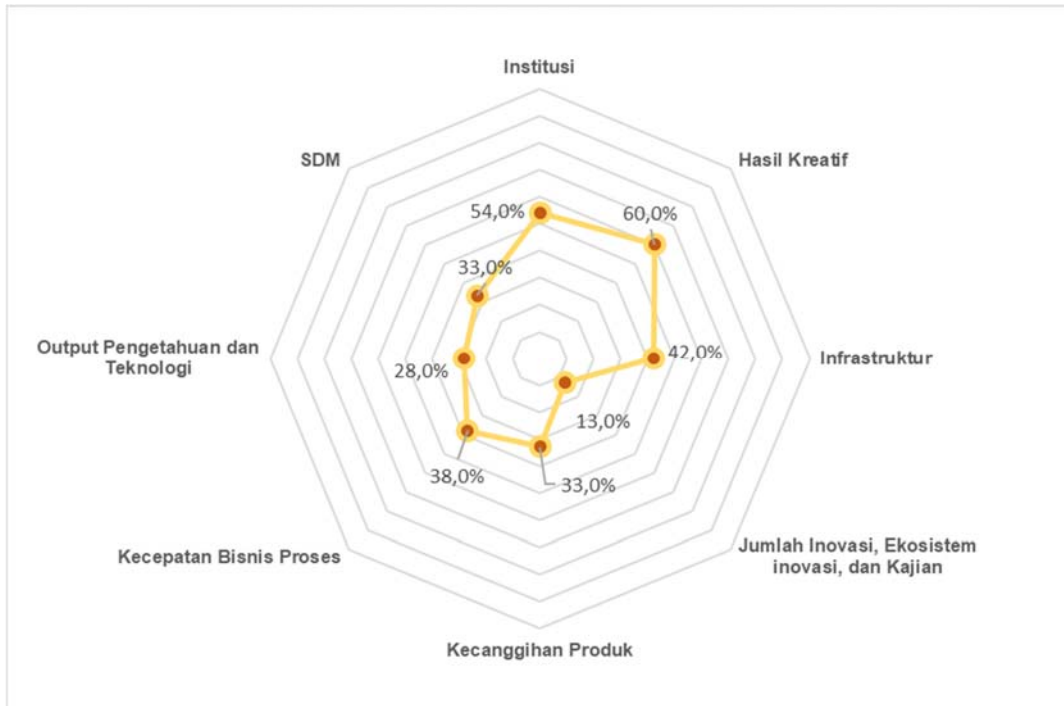
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran, Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, dan Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem sebesar 67% artinya lebih dari separuh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman teknis sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Provinsi Maluku beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Provinsi Maluku beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Menjangkau Yang Tidak Terjangkau dengan SMS (Scilling Medical Service)	0
Surat Masuk Cerewet (Cepat Respon, Tepat Waktu, Enteng Tugas)	15
Pelayanan Drive Thru	0
ASIK (ASN berbasis bukti)	0
SIPELANGI (Strategi Pengawasan, Pelaporan Perlindungan Konsumen Berbasis Aplikasi Android)	97
SMART SERVICE	0
E-OFFICE	45
SIMPONI INDAG (Sistem Promosi dan Pemasaran Produk IKM)	0
KPKP (Klinik Perumahan Kawasan Permukiman)	0
Duta Perangi Stunting (Duta Parenting)	124
RBS (Rumah Basudara Sejahtera)	36
BARACI SAGU (Bincang Rancangan Retribusi Sambil Minum Air Guraka)	83
Walang Kesehatan	98
SAMA THUKEL (Samsat Mall, Drive Thru, Keliling dan Elektronik)	120
Early Information System 247 (Pelayanan 24 Jam 7 Hari Seminggu)	79
BACARI (Baca Cari Informasi Hukum)	107
SASAPU LIDI (SADAR AKAN SERTIFIKAT AMAN PANGAN BERMUTU UNTUK LINDUNGI DIRI)	101
MENJANGKAU YANG TIDAK TERJANGKAU DENGAN SAILING MEDICAL SERVICE (SMS)	0
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN / SIMPEG	69
Sistem Informasi Gugus Pulau Kesehatan	123
SIPANDAN "SAHABAT PETANI" SISTIM INFORMASI PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH.	86
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan melalui Kunjungan Rumah/Home Visite	47
Tim Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Maluku	0
Counter bandara	0
SISTEM INFORMASI PERKEMBANGAN INDIKATOR DAERAH	65
BAILEO MALUKU (Basis Data dan Informasi Lingkup Perumahan Permukiman Provinsi Maluku)	43

D. PROVINSI MALUKU UTARA



Gambar 34 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Maluku utara

Berdasarkan diagram variable ukur indeks inovasi daerah di atas, Provinsi Maluku utara memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 60.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 13.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku utara

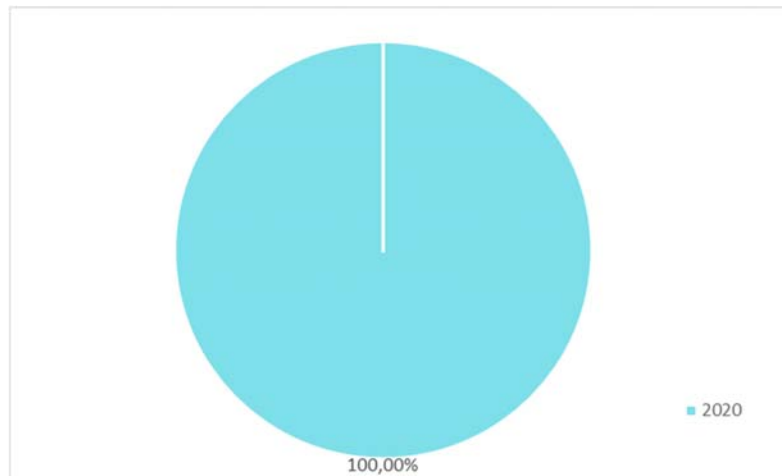
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku utara belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran yang mengalami kenaikan sebesar 0,18%. Nilai tersebut lebih baik dari standar parameter indeks inovasi daerah tahun 2021 yang naik sebesar 0,92%. Selanjutnya angka kemiskinan juga naik sebesar 0,20% yang lebih tinggi dibanding standar parameter yang turun sebesar 0,02%. Kemudian, indikator nilai IPM yang mengalami penurunan sebesar 4,21%, nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks yang bernilai 0%. Indikator yang tidak mengalami perubahan adalah Jumlah Peningkatan PAD meski demikian nilai tersebut masih lebih rendah dibanding standar parameter yang naik sebesar 8%. Kondisi serupa pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, nilai ini juga lebih rendah dari standar parameter yang naik sebesar 5%. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah Jumlah Pendapatan Perkapita

dengan penurunan sebesar 19,34%, nilai tersebut juga lebih rendah dibanding standar parameter yang turun sebesar 1,85%.

Sebaliknya, Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 66,67%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

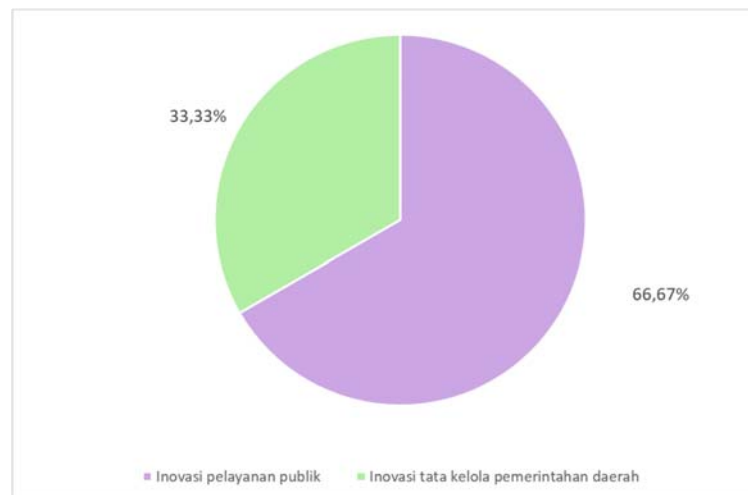
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, 3 dari 3 (100%) inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku utara mulai diterapkan di tahun 2020.

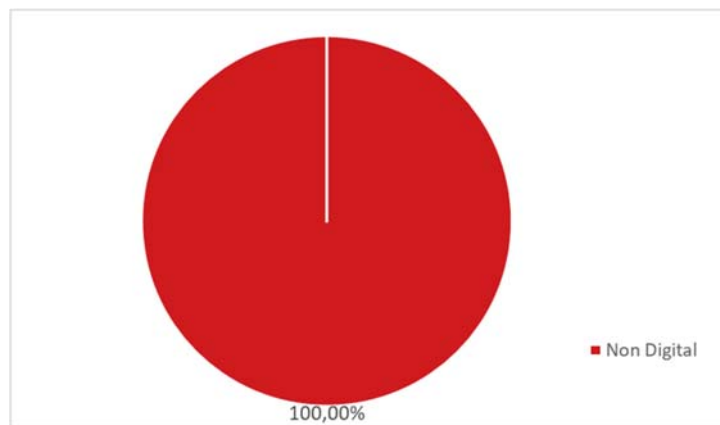
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku utara, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum dilaporkan. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 2 (66,67%) inovasi dan 1 (33,33%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

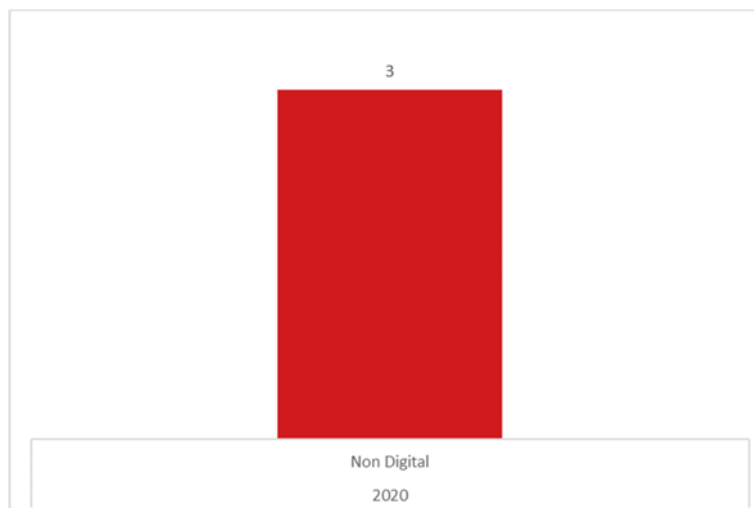
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 3 (100%) dari 3 inovasi daerah yang dilaporkan Provinsi Maluku utara merupakan inovasi non digital sementara untuk inovasi digital belum dilaporkan.

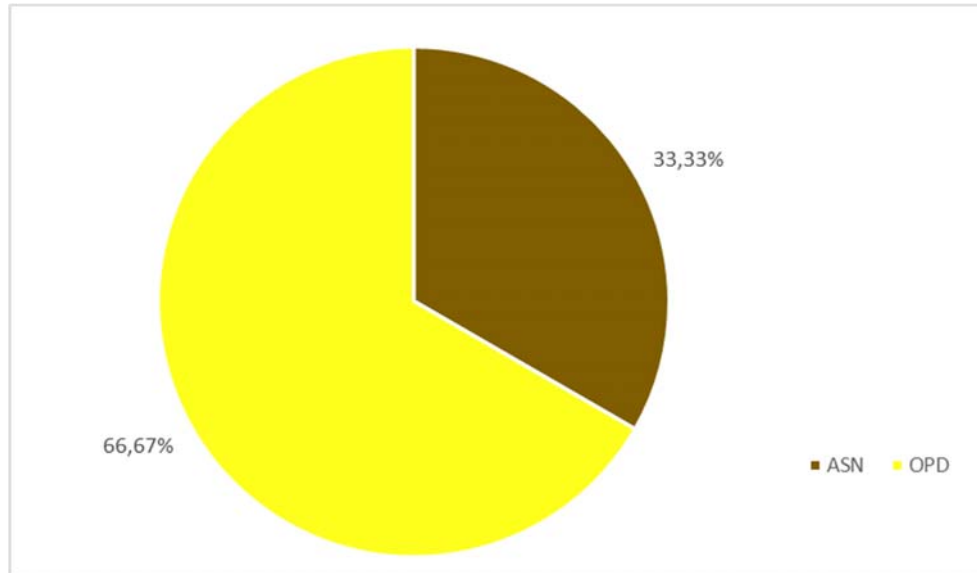
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Maluku utara

Tidak ada perubahan jumlah inovasi berdasarkan jenis dan tahun yang dilaporkan Provinsi Maluku Utara

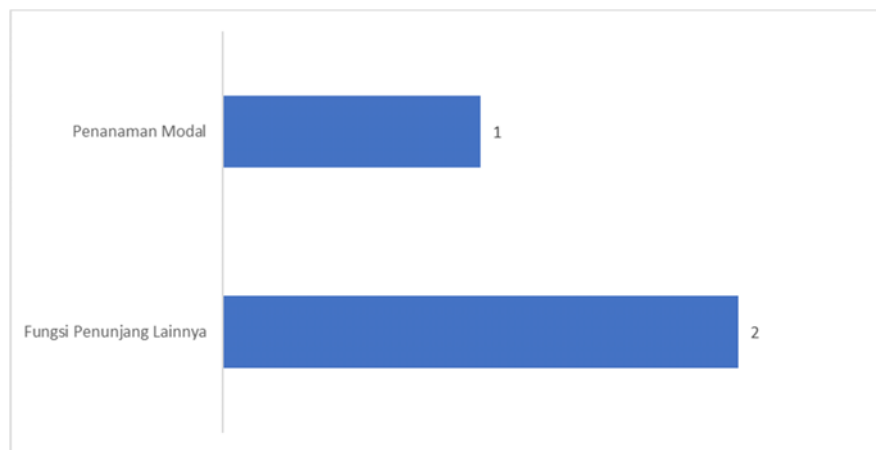
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Maluku utara

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku utara pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 2 (66,67%) inovasi dan 1 (33,33%) inovasi diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara, sementara inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD, Masyarakat dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

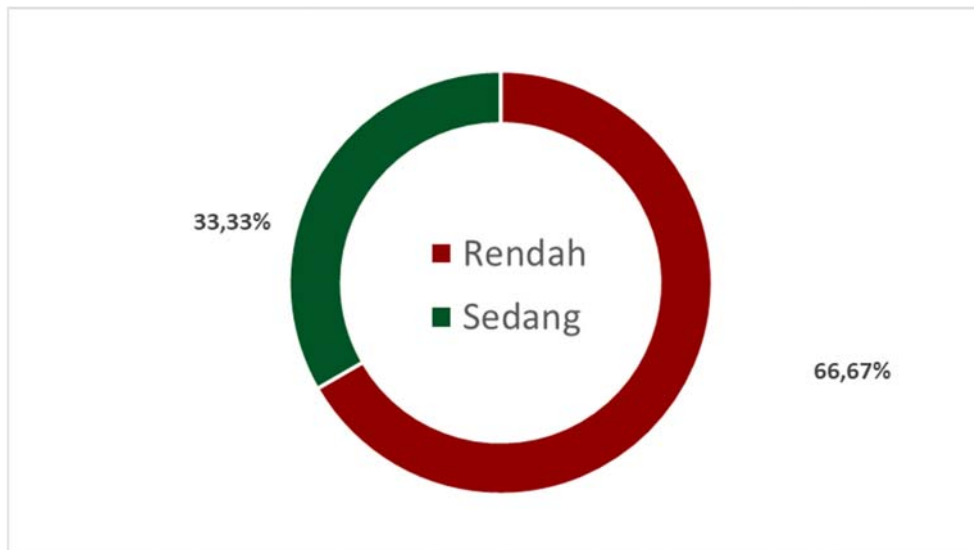
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Maluku utara

Sebaran inovasi daerah pada Provinsi Maluku utara berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata mengingat jumlah inovasi yang dilaporkan masih rendah. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada Fungsi Penunjang Lainnya dengan 2 inovasi kemudian 1 urusan lainnya merupakan urusan penanaman modal. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak ada inovasi dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang terlaporkan.

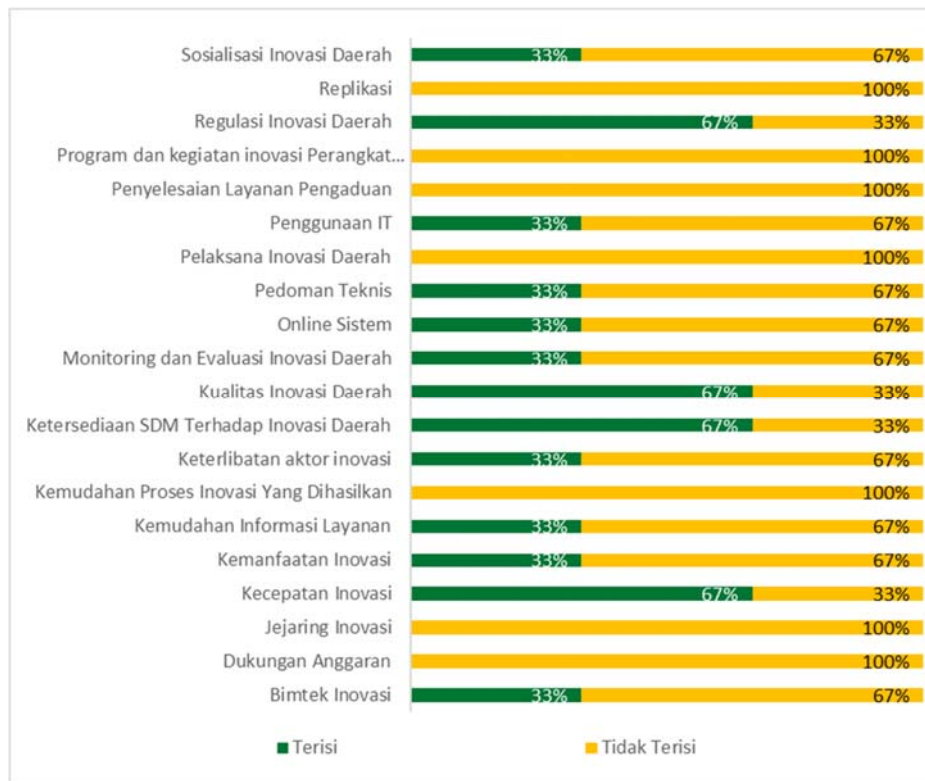
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Maluku utara

1 2 Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan rendah, dimana terdapat 2 (66,67%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Kemudian terdapat 1 (33,33%) inovasi mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



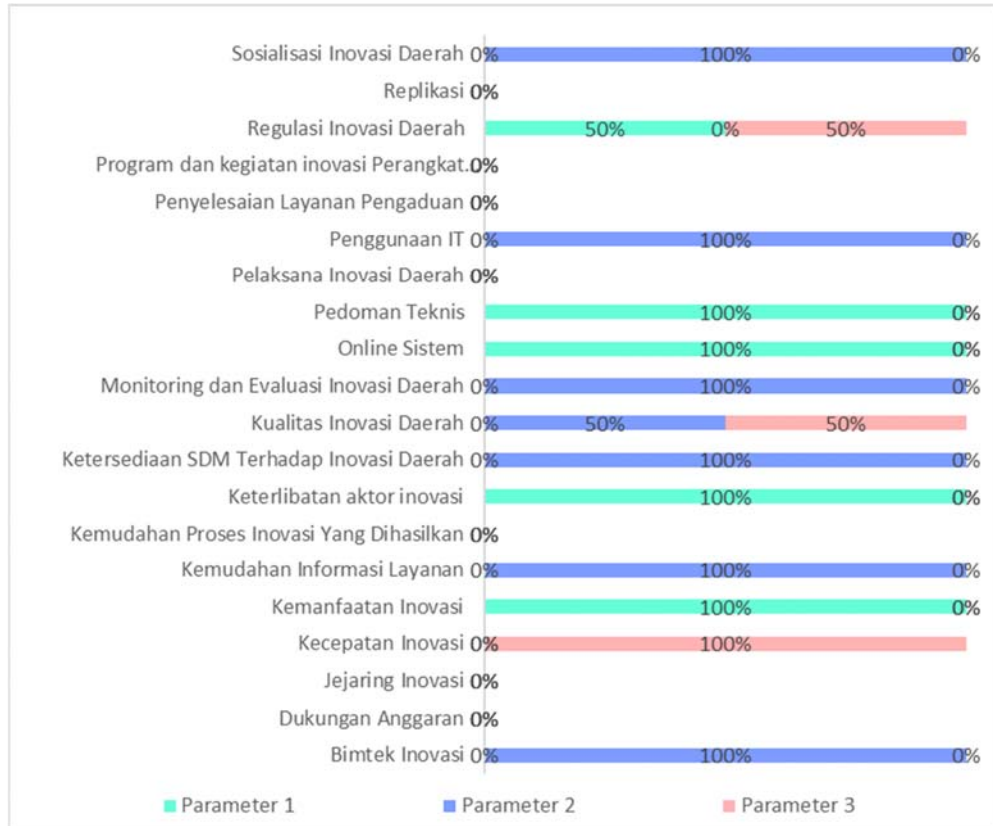
Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku utara

Dari 3 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku utara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 71,67% sedangkan 28,33% lainnya telah terisi data pendukung. Tidak ada indikator dengan tingkat keterisian 100%. Indikator dengan keterisian tertinggi adalah Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDm terhadap Inovasi Daerah, dan Kecepatan Penciptaan Inovasi dengan keterisian 67%. Artinya, 67% inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku utara telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah terdapat pada RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Pelaksana Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Jejaring Inovasi dan Dukungan Anggaran yaitu sebesar 0% artinya

tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indicator Penggunaan IT, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan dan, Bimtek Inovasi dengan 100% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis, Online Sistem, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan

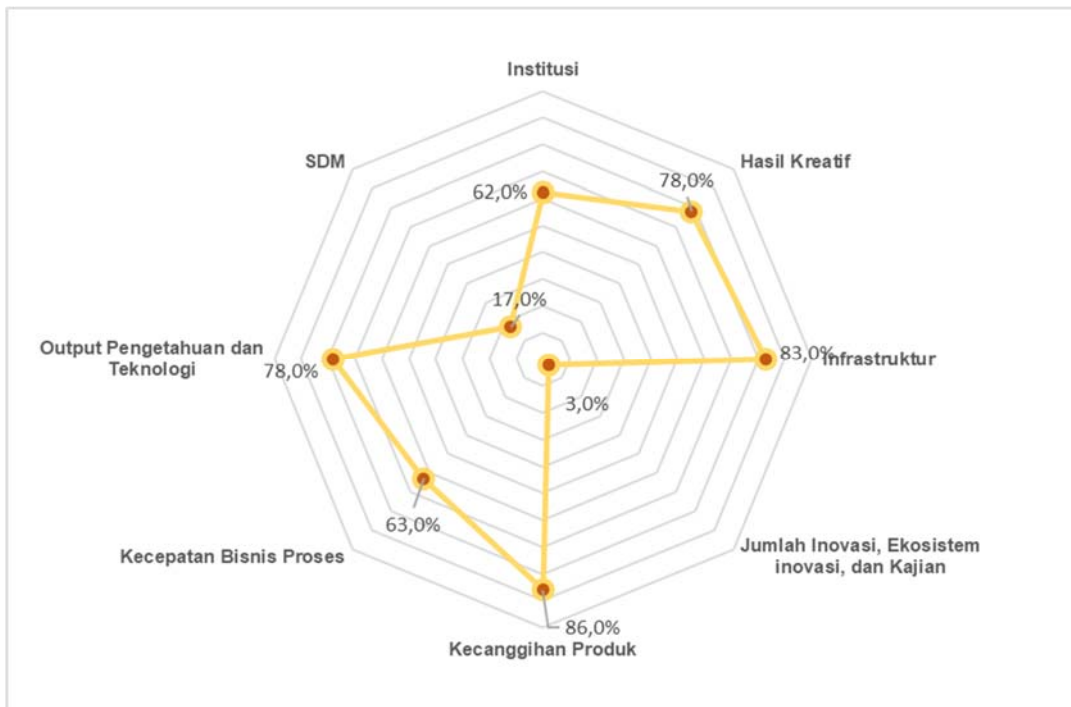
Kemanfaatan Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Provinsi Maluku utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Provinsi Maluku Utara beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
TOSILOFO MAA GERAI PELAYANAN BEBAS COVID 19	0
Gerakan Edukasi Perubahan Aparatur Handal Membahana (GERHANA)	66
Ino Polo Mitra (Inovasi Pojok dan Lorong Berbasis Kemitraan)	18

E. PROVINSI PAPUA



Gambar 45 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Papua

Berdasarkan diagram variable ukur indeks inovasi daerah di atas, Provinsi Papua memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 86.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang berada pada nilai tengah (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah

Inovasi, ekosistem inovasi, dan kajian masih sangat rendah, yaitu 3.0% dimana artinya sebagian besar indikator pada variabel tersebut yang telah memiliki nilai.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 46 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi papua

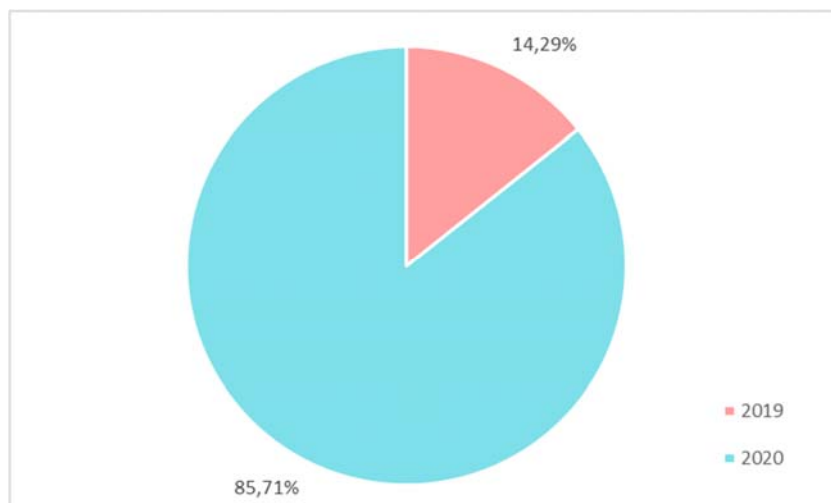
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran yang mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Nilai tersebut lebih baik dari standar parameter indeks inovasi daerah tahun 2021 yang naik sebesar 0,92%. Selanjutnya angka kemiskinan juga naik sebesar 0,09% yang lebih tinggi dibanding standar parameter yang turun sebesar 0,02%. Kemudian, indikator nilai IPM yang mengalami penurunan sebesar 0,40%, nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks yang bernilai 0%. Kemudian Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 29,07%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Indikator yang tidak mengalami perubahan adalah Jumlah

Peningkatan PAD meski demikian nilai tersebut masih lebih rendah dibanding standar parameter yang naik sebesar 8%.

Sebaliknya, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami kenaikan dari tahun lalu sebesar 379,51%, nilai ini lebih tinggi dari standar parameter yang naik sebesar 5%. Indikator lain yang mengalami perbaikan adalah Jumlah Pendapatan Perkapita dengan kenaikan sebesar 3,26%, nilai tersebut juga lebih rendah dibanding standar parameter yang turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

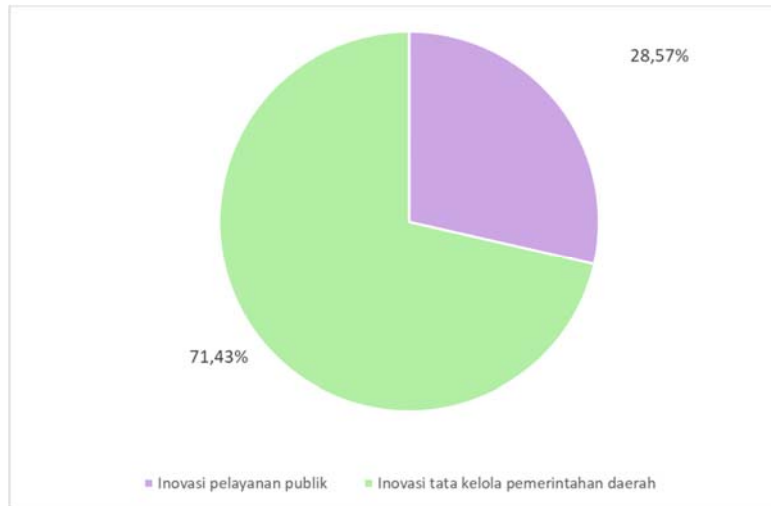
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Papua

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Papua telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 6 (85,71%) inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 1 (14,29%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

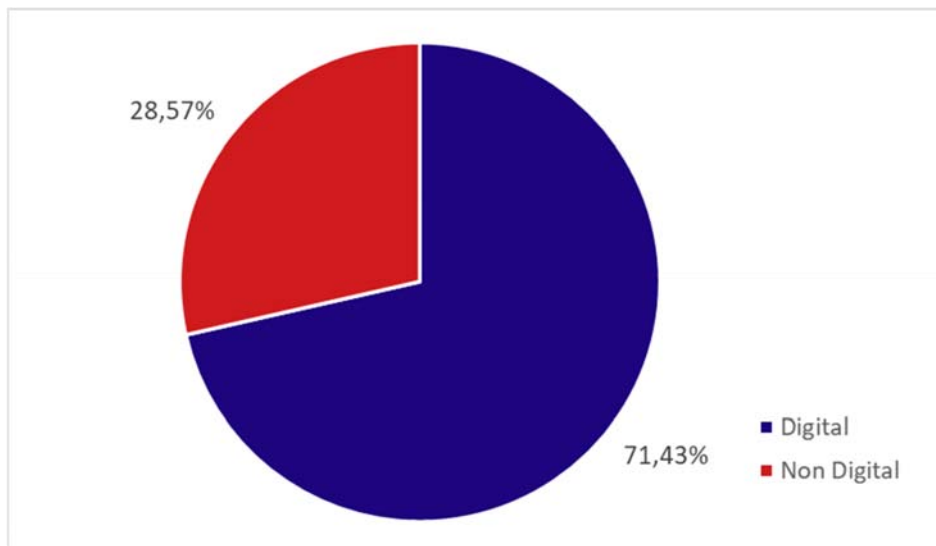
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi papua

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi papua, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Mayoritas inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan sejumlah 5 (71,43%) inovasi dan 2 (28,57%) inovasi adalah pelayanan publik. Inovasi bentuk lainnya belum dilaporkan di tahun 2021.

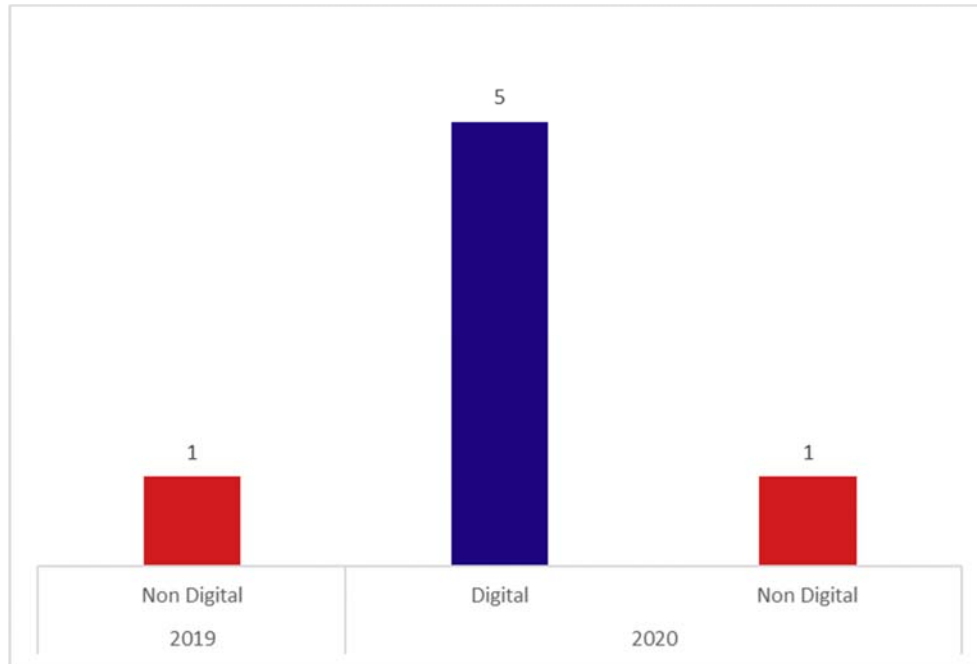
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi papua

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (71,43%) dari 7 inovasi daerah yang dilaporkan Provinsi Papua merupakan inovasi digital dan 2 (28,57%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

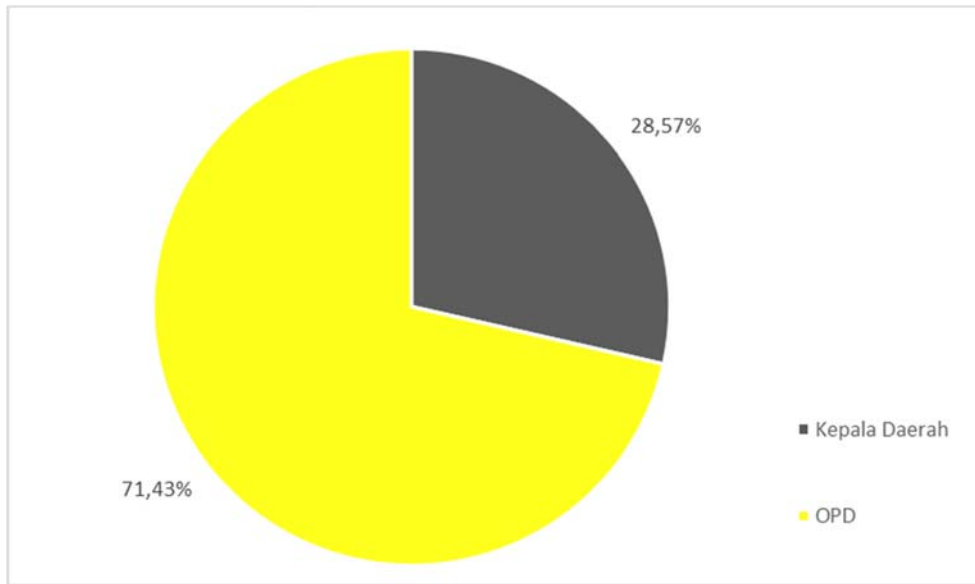
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Papua

Terdapat kenaikan jumlah pada inovasi digital yang tidak diikuti oleh inovasi non digital. Pada inovasi digital terdapat kenaikan sebesar 5 inovasi digital, pada tahun 2019 tidak ada inovasi digital yang mulai diterapkan kemudian ada 5 inovasi digital yang baru diterapkan di tahun 2020. Inovasi non digital tidak mengalami kenaikan jumlah inovasi baru. Di tahun 2020 terdapat 1 inovasi non digital yang baru diterapkan sementara di tahun 2019 ada 1 inovasi non digital yang baru diterapkan.

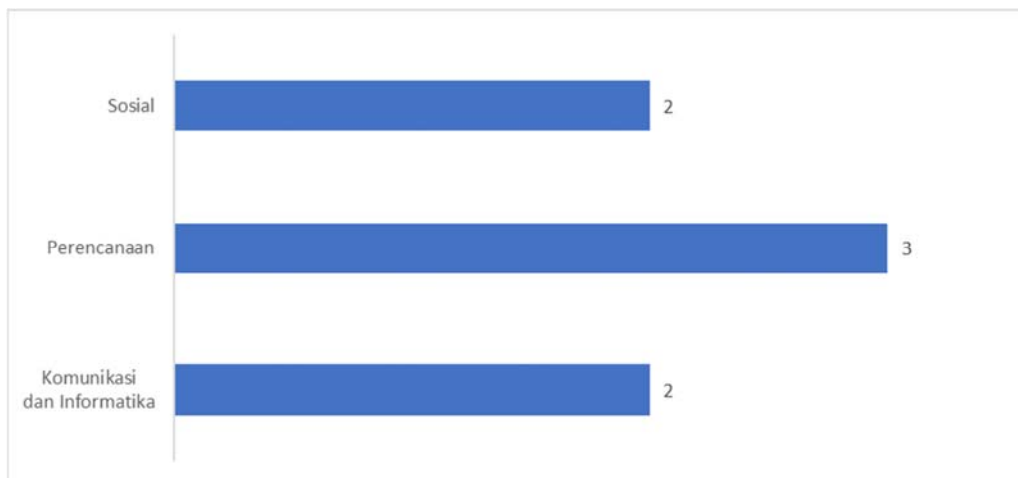
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi papua

5 2 Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Provinsi papua pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 5 (71,43%) inovasi sementara 2 (28,57%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD, Masyarakat, dan ASN belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

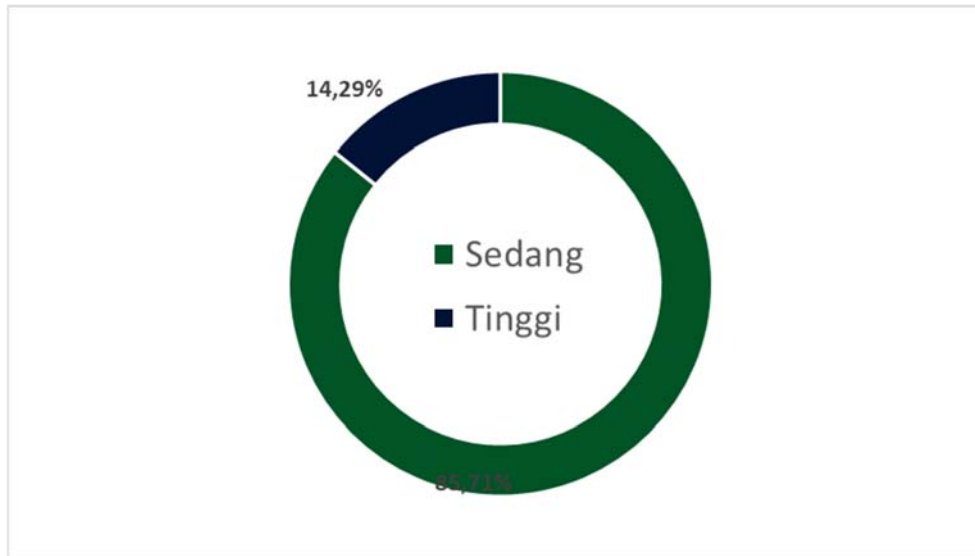


Gambar 52 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi papua

Sebaran inovasi daerah pada Provinsi papua berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan

Perencanaan dengan 3 inovasi kemudian 2 inovasi dari urusan Sosial dan Komunikasi dan Informatika. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, belum ada inovasi dari urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaporkan di tahun 2021.

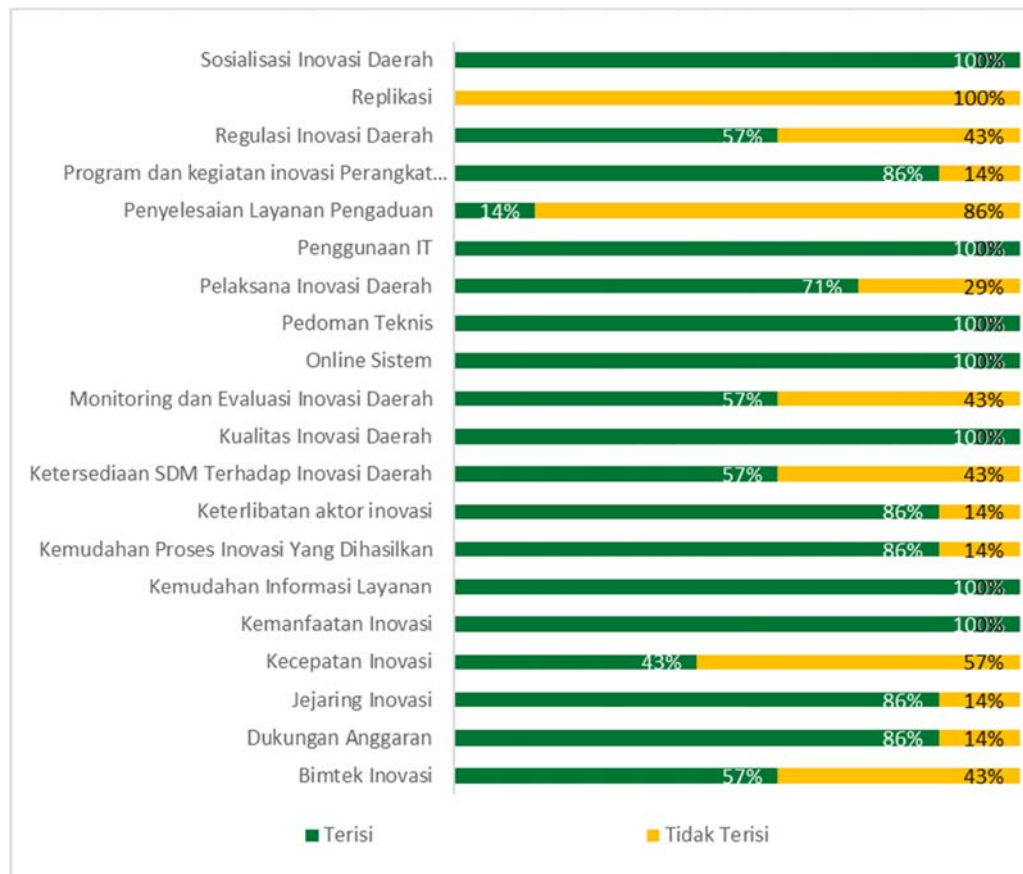
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi papua

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, 6 (85,71%) inovasi telah mencapai skor kematangan sedang dan 1 (14,29%) inovasi telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

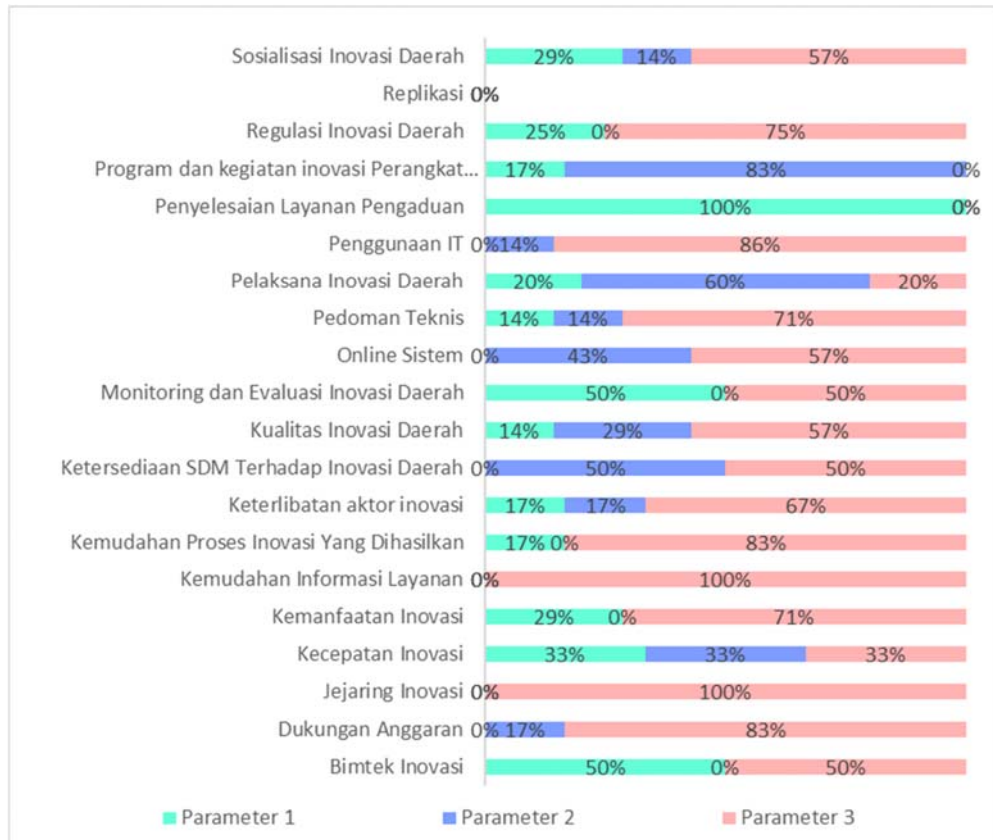


Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi papua

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi papua, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 25,71% sedangkan 74,29% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Pedoman teknis, Online Sistem, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Informasi dengan keterisian 100%. Artinya seluruh inovasi yang telah dilaporkan telah memenuhi indikator tersebut.

Indikator dengan tingkat keterisian terendah adalah indikator replikasi dengan keterisian 0% artinya belum ada satupun inovasi yang telah dilaporkan memenuhi indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dari 5 indikator yang telah terisi, indikator Kemudahan Informasi Layanan dan jejaring Inovasi telah memenuhi parameter 3 (maksimal) dengan keterisian 100% artinya seluruh inovasi telah dapat memenuhi parameter ketiga pada kedua indikator tersebut. Kemudian untuk indikator dengan parameter kedua tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD dengan keterisian 86%. Sementara Indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan 100% terisi pada parameter 1.

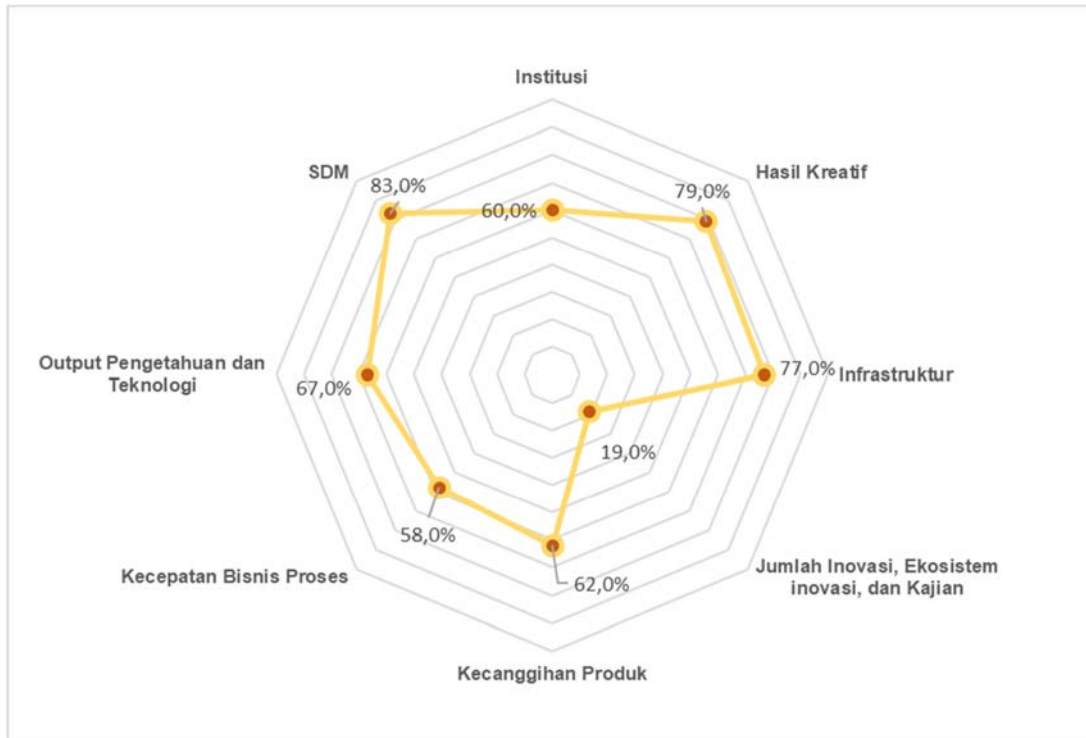
j. Daftar Inovasi Provinsi Papua beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Provinsi Papua beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Papua Integrated Satu Data (PAITUA)	99
BANGGA PAPUA (Bangun Generasi Emas dan Keluarga Papua yang Sejahtera)	102
Gerbangmas Hasrat Papua (Gerakan Bangkit Mandiri dan	85

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua)	
Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang) Papua	94
Sistem Informasi Presensi Dan TPP	85
Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pemerintah Provinsi Papua	88
Sistem informasi manajemen tata ruang (SIMTARU) Papua	98

F. PROVINSI PAPUA BARAT



Gambar 56 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Provinsi Papua Barat

Berdasarkan diagram variable ukur indeks inovasi daerah di atas, Provinsi Papua Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 19.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 57 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua Barat

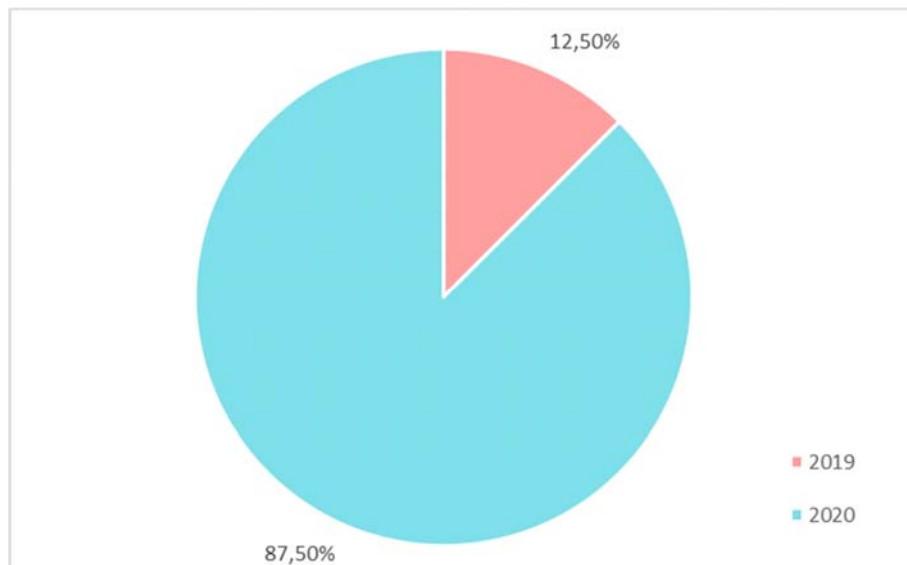
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua Barat belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang turun sebesar 0,56% meskipun demikian nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0,92%. Kemudian indikator Kualitas Perizinan yang juga turun sebesar 60,09% di mana angka tersebut cukup jauh di bawah standar nasional parameter yang naik sebesar 5%. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 0,93% yang mana meskipun mengalami penurunan nilai ini lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%. Terakhir, indikator Jumlah Peningkatan PAD yang naik sebesar 33,16%, cukup jauh dibandingkan dengan standar nasional parameter yang naik 5%.

Sebaliknya, Indikator Angka Kemiskinan yang mengalami perbaikan sebesar 0,80% yang mana lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter

0,02%. Indikator selanjutnya adalah Nilai IPM yang naik sebesar 0,39, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan standar nasional parameter yang bernilai 0 atau tetap. Indikator Peningkatan Investasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 79892,3%, kondisi tersebut jauh di atas standar nasional parameter yang naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

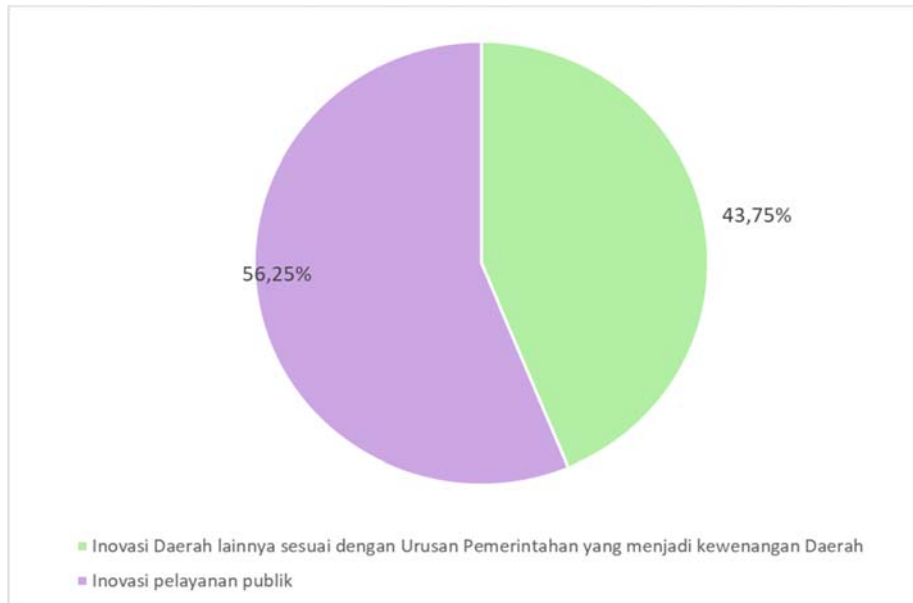
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Papua Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Papua Barat telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 14 (87,50%) inovasi dari 16 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 2 (12,50%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

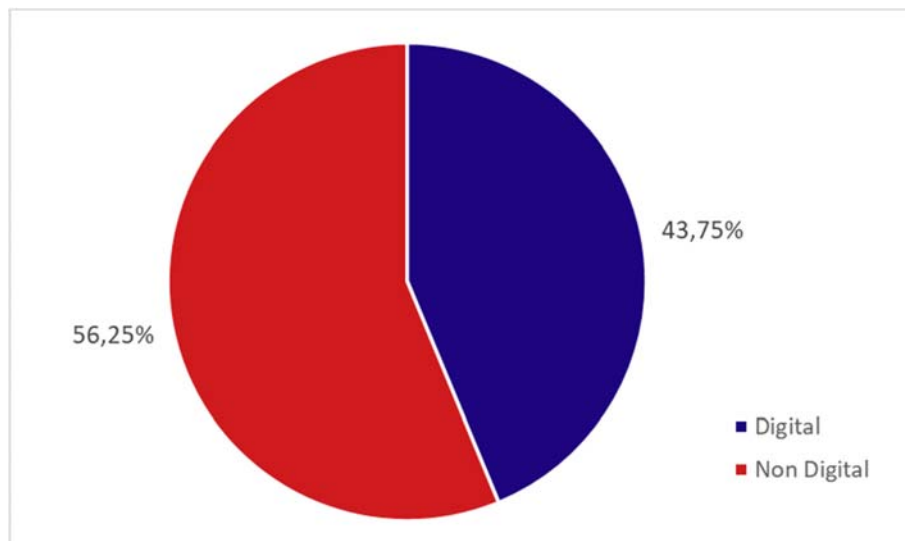
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Papua Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Papua Barat, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 9 (56,25%) inovasi dan 7 (43,75%) inovasi lainnya adalah inovasi bentuk lainnya.

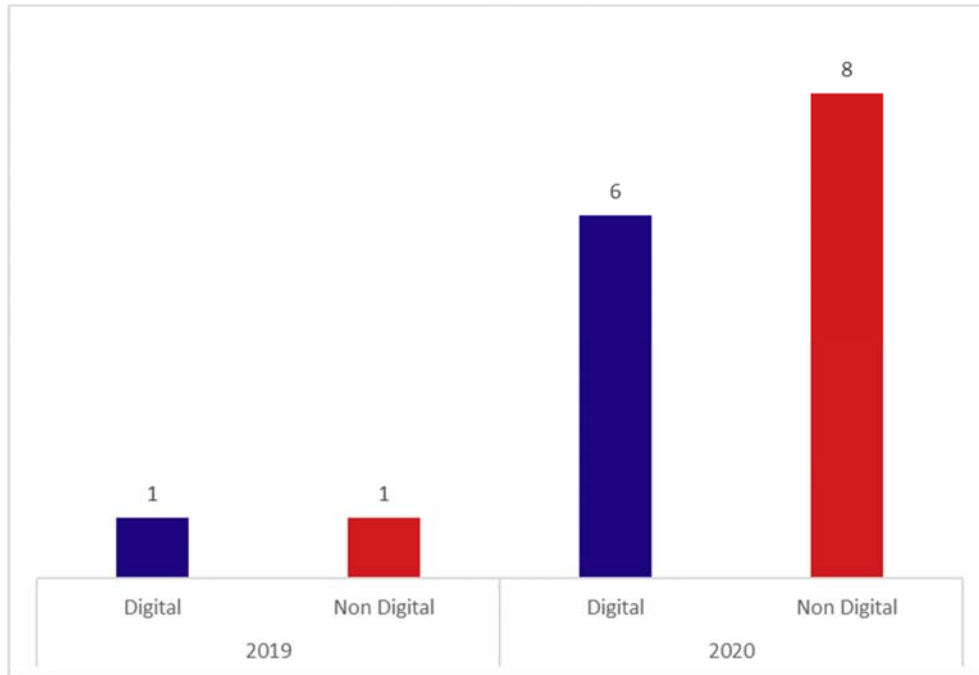
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Papua Barat

7.9 Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (56,25%) dari 16 inovasi daerah yang dilaporkan Provinsi Papua Barat merupakan inovasi non-digital dan 7 (43,75%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

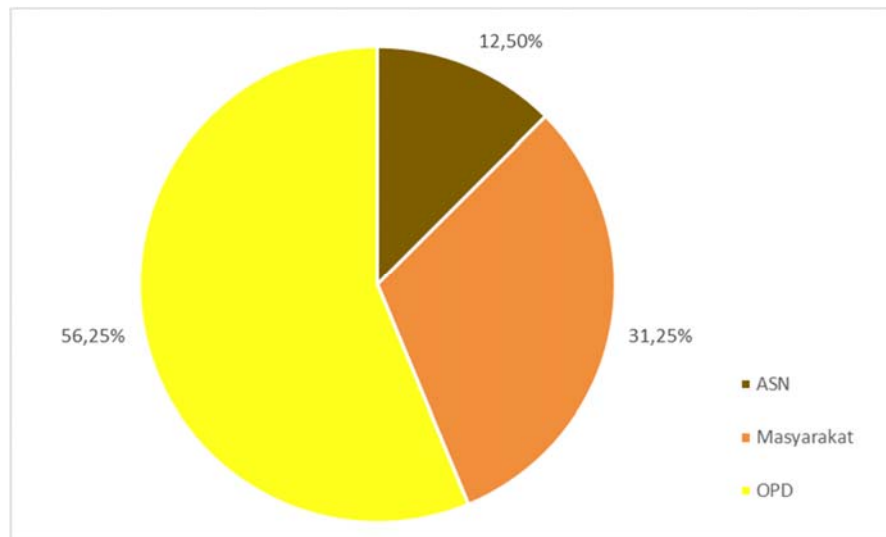
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Provinsi Papua Barat

Terdapat kenaikan jumlah sebesar 7 inovasi digital yang baru diterapkan di tahun 2020 dari tahun 2019. Hal ini juga diikuti oleh kenaikan jumlah inovasi digital. Pada tahun 2020 inovasi digital yang mulai diterapkan di Provinsi Papua Barat ada 6 yang mana jumlah ini lebih banyak dari tahun 2019 dengan 1 inovasi digital mulai diterapkan. Sementara untuk inovasi non digital ada 8 inovasi yang baru diterapkan di tahun 2020 di mana pada tahun 2019 hanya terdapat 1 inovasi baru yang mulai diterapkan.

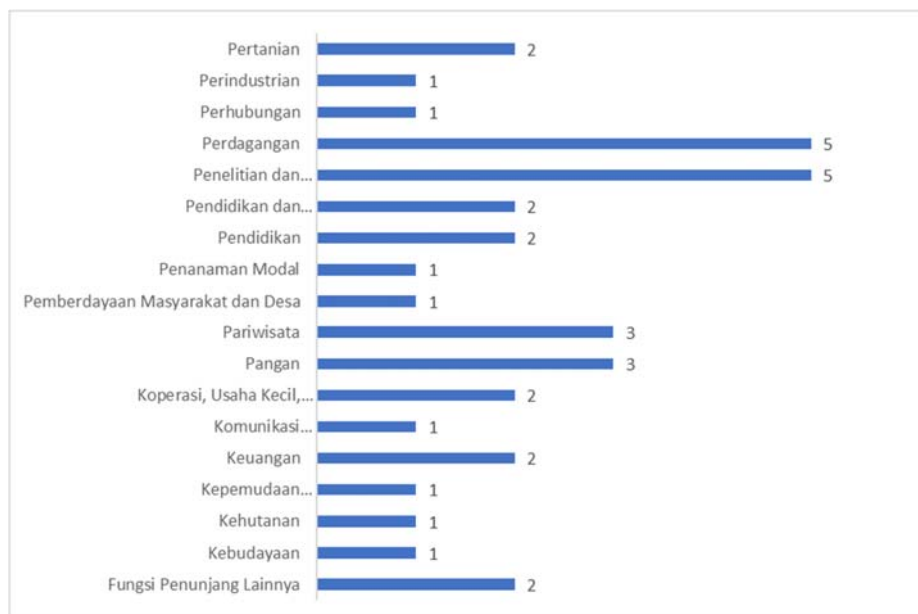
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Provinsi Papua Barat

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 9 (56,25%) inovasi sementara 5 (31,25%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat, kemudian 2 (12,50%) inovasi diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

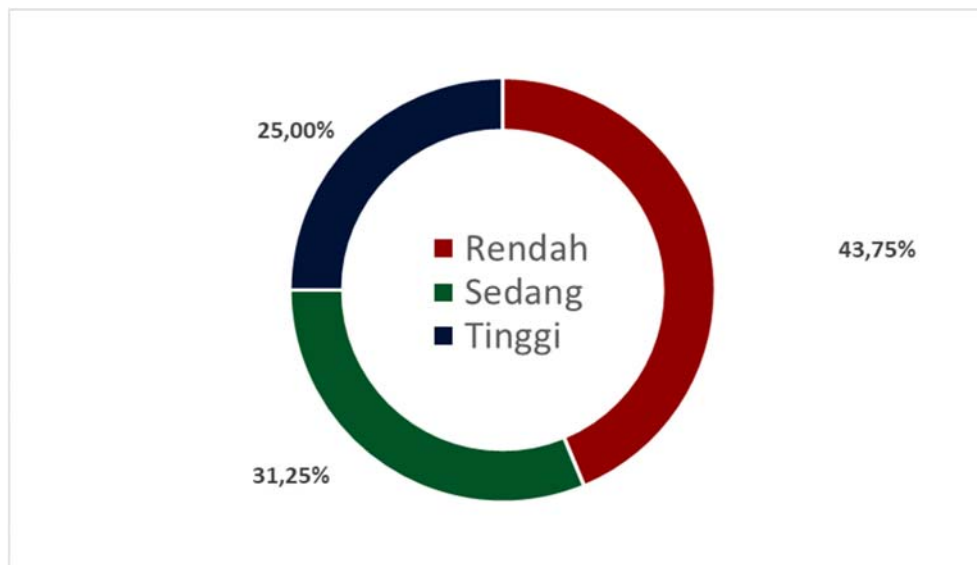


Gambar 63 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Papua Barat

Sebaran inovasi daerah pada Provinsi Papua Barat berdasarkan urusan pemerintahan telah cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Perdagangan dan Penelitian dan Pengembangan dengan 5 inovasi kemudian 3 inovasi dari Pangan dan Pariwisata. Selanjutnya, masing-masing 2 inovasi pada urusan Pertanian, Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, dan Fungsi Penunjang lainnya. Terakhir, dengan masing-masing 1 inovasi adalah urusan Perindustrian, Perhubungan Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komunikasi dan Informasi, Kepemudaan dan Olahraga, Kehutanan, dan Kebudayaan.

Inovasi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang telah dilaporkan oleh Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 adalah Urusan Pendidikan. Sementara inovasi pada 5 urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

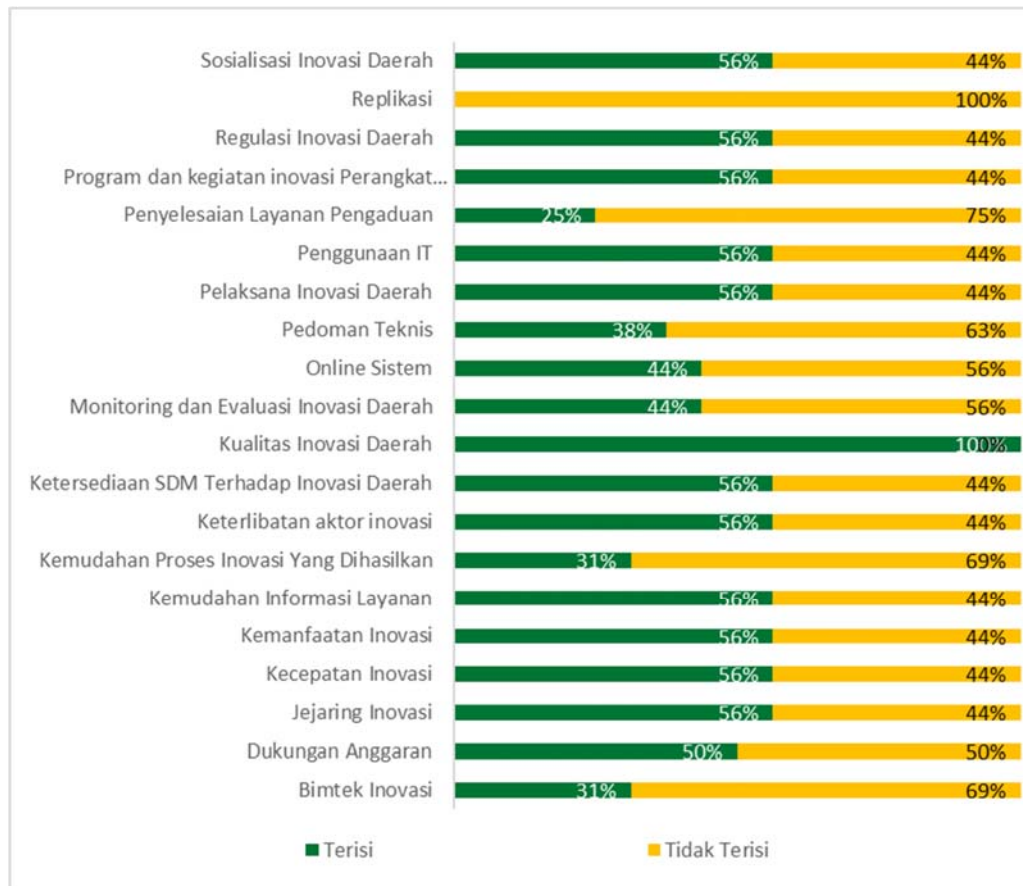


Gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Papua Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan rendah, di mana terdapat 7 (42,86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Kemudian terdapat 5 (31,25%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan 4 (25,00%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50,

skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

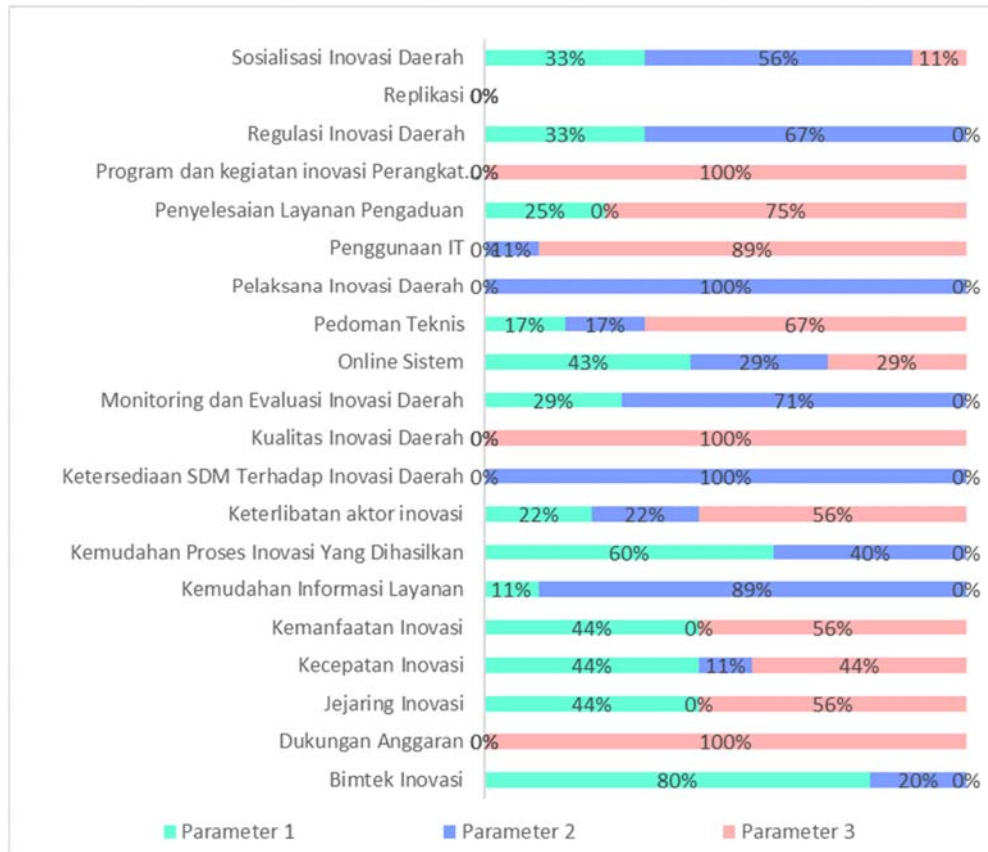


Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat

Dari 16 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Papua Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 50,94% sedangkan 49,06% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator yang terisi penuh 100% adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Kualitas Inovasi Daerah, dan Dukungan Anggaran dengan 100% keterisian pada parameter 3, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM pada Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 80% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi.

j. Daftar Inovasi Provinsi Papua Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Provinsi Papua Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Pasar Tradisional	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Pasar Modern	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor PTSP	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Perhotelan	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Restoran	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Transportasi	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Pariwisata	15
Mata Pena Litbangtara Papua Barat	85
Ilmuwan Muda Papua (IdA PAPUA)	103
Majalah Kasuari Inovasi (MAKASI)	100
Jurnal Ilmiah Igya Ser Hanjop	103
Buku Kelitbangan dan Inovasi Daerah	95
Jemput Koper	97
e-Formulir	93
Bapokting Papua Barat	100
MINI CATTLE YARD (MC YARD SIPANDU) SOLUSI PELAYANAN TERPADU SAPI POTONG DI PROVINSI PAPUA BARAT	82

The background is a solid green color with a subtle batik pattern. The pattern features a central figure holding a torch, surrounded by various geometric and floral motifs. The text is overlaid on this background.

BAB III

PEMBAHASAN REKOMENDASI

Pada wilayah ini terdapat 6 Provinsi namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 75,67 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan replikasi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, dan bantuan HKI.

B. Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 53,38 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi.

C. Maluku

Maluku memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 32,66 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi.

D. Maluku Utara

Maluku Utara memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 24,44 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan teknis, dan pemetaan inovasi daerah.

E. Papua

Papua memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 49,36 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi.

F. Papua Barat

Papua Barat memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 40,64 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi.